

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 294 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCABALI
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCABALI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau yang disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Kecamatan Rancabali untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Kecamatan Rancabali untuk periode 1 (satu) tahunan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

BAB II
RUANG LINGKUP
RENSTRA KECAMATAN RANCABALI

Pasal 2

Dokumen Renstra Kecamatan Rancabali merupakan dokumen perencanaan strategis Kecamatan Rancabali untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Rancabali yang memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Rancabali yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Renstra Kecamatan Rancabali bertujuan untuk:

a. menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan visi misi RPJMD dan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Rancabali dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Kecamatan Rancabali dalam implementasinya;
b. menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelayanan Kecamatan Rancabali agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
c. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Kecamatan Rancabali;
d. menyediakan dasar *(benchmark)* untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Rancabali;
e. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan
f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Kecamatan Rancabali.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA KECAMATAN RANCABALI

Pasal 4

(1) Renstra Kecamatan Rancabali Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Kecamatan Rancabali dalam menyusun Renja Kecamatan Rancabali.

(2) Renstra Kecamatan Rancabali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I pendahuluan paling sedikit memuat:
   1. latar Belakang;
   2. dasar hukum penyusunan;
   3. maksud dan tujuan; dan
   4. sistematika penulisan.

b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Kecamatan Rancabali paling sedikit memuat:
   1. gambaran pelayanan Kecamatan Rancabali; dan
   2. permasalahan dan isu strategis Kecamatan Rancabali.

c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:
   1. tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Rancabali Tahun 2025-2029;
   2. strategi Kecamatan Rancabali dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
   3. arah kebijakan Kecamatan Rancabali dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

d. bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:
   1. uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
   2. uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
   3. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama Kecamatan Rancabali; dan
   4. target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.

e. Bab V penutup paling sedikit memuat:
   1. kesimpulan;
   2. kaidah pelaksanaan; dan
   3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

(3) Dokumen Renstra Kecamatan Rancabali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA KECAMATAN RANCABALI

Pasal 5

(1) Kecamatan Rancabali melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Rancabali dan evaluasi hasil Renstra Kecamatan Rancabali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.
(2) Bapperida melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Kecamatan Rancabali terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Rancabali.
(3) Camat Rancabali menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra Kecamatan Rancabali.
(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN RANCABALI

Pasal 6

Perubahan Renstra Kecamatan Rancabali dapat dilakukan apabila :

a. perubahan Renstra Kecamatan Rancabali mempedomani perubahan RPJMD;
b. perubahan Renstra Kecamatan Rancabali dilakukan sekurang kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan
c. apabila terdapat perubahan kelembagaan Kecamatan Rancabali, maka Renstra Kecamatan Rancabali dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 7

Perubahan Renstra Kecamatan Rancabali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Kecamatan Rancabali Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2) Dalam hal pelaksanaan Renstra Kecamatan Rancabali terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, perubahan dapat dilakukan dalam Renja Kecamatan Rancabali.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
(4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 294

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 294 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCABALI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCABALI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCABALI
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCABALI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, tugas pokok perangkat daerah Kecamatan adalah melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sebagai perangkat daerah yang berada di garis depan dalam memberikan pelayanan publik dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum, kecamatan memiliki peran strategis dalam menjawab berbagai kebutuhan dan dinamika masyarakat. Dalam konteks ini, kecamatan dituntut untuk mampu merespons kompleksitas persoalan sosial, ekonomi, dan administrasi masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance*, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut dan dalam rangka melaksanakan wewenang dengan sebaik-baiknya, maka perlu disusun suatu dokumen perencanaan baik tahunan maupun jangka menengah yang disebut Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra).

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra perangkat

daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau pilihan yang menjadi kewenangan daerah sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Renstra juga menjabarkan indikator kinerja utama dan indikator kinerja program yang terukur sebagai tolak ukur capaian pelaksanaan pembangunan.

Adapun proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 16 ayat (2) disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Selain itu, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 ini juga berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Selaras dengan sistem perencanaan nasional dan daerah, dokumen Renstra Kecamatan Rancabali Tahun 2025–2029 memiliki keterkaitan langsung dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, diantaranya:

a. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dan merupakan pelaksanaan program-program pembangunan dari visi dan misi Bupati terpilih.
b. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 ini dijadikan sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rancabali setiap tahunnya selama kurun waktu 2025-2029.

Dengan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, setiap program dan kegiatan kecamatan diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih terukur, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mampu memastikan tercapainya tujuan pembangunan wilayah secara efektif dan efisien, serta turut berkontribusi dalam mewujudkan visi Kabupaten Bandung "Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas".

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
c. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
d. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
h. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
l. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 4);

o. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5);
p. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 100);
q. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
r. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);
s. Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
t. Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Rancabali adalah memenuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Intruksi Mentri Dalam Negri Nomor 2 tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu sebagai arah dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan Kecamatan Rancabali sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara terpadu, sinergi dan harmonis serta berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Rancabali Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan sasaran lima tahunan Kecamatan Rancabali, termasuk strategi dan arah kebijakan yang diambil sesuai yang diterjemahkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka mencapai dan mendukung visi misi Kabupaten Bandung yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 berupa arah kebijakan program Kewilayahan di Kecamatan yang menitik beratkan pada Peningkatan Pelayanan Publik yang merupakan salah satu bentuk kinerja kecamatan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Goverment*).

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan paling sedikit memuat:

1. latar Belakang;
2. dasar hukum penyusunan;
3. maksud dan tujuan; dan
4. sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN RANCABALI

Bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Kecamatan Rancabali paling sedikit memuat:

1. gambaran pelayanan Kecamatan Rancabali; dan
2. permasalahan dan isu strategis Kecamatan Rancabali.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN RANCABALI

Bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:

1. tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Rancabali Tahun 2025-2029;
2. strategi Kecamatan Rancabali dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
3. arah kebijakan Kecamatan Rancabali dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:

1. uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
2. uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
3. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama Kecamatan Rancabali ; dan
4. target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci;
5. inovasi Kecamatan Rancabali.

BAB V PENUTUP

Bab V penutup paling sedikit memuat:

1. kesimpulan;
2. kaidah pelaksanaan; dan
3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Rancabali

Kecamatan Rancabali sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Bandung memiliki peran penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewilayahan. Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Bandung, kecamatan menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap gambaran pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Rancabali menjadi bagian penting dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025–2029. Gambaran ini tidak hanya berfungsi sebagai potret kinerja pelayanan saat ini, tetapi juga menjadi dasar penting dalam menyusun strategi peningkatan kualitas pelayanan publik yang adaptif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, pelayanan publik di Kecamatan Rancabali diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat serta selaras dengan arah pembangunan Kabupaten Bandung.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Rancabali

Kedudukan kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Rancabali mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya.

b. Penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya.

c. Penyelengaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya, dan

d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja kecamatan. Dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2021 disebutkan bahwa Camat membawahkan jabatan sebagai berikut:

a. Sekretariat.

b. Seksi Pemerintahan,

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat,

d. Seksi Pembangunan,

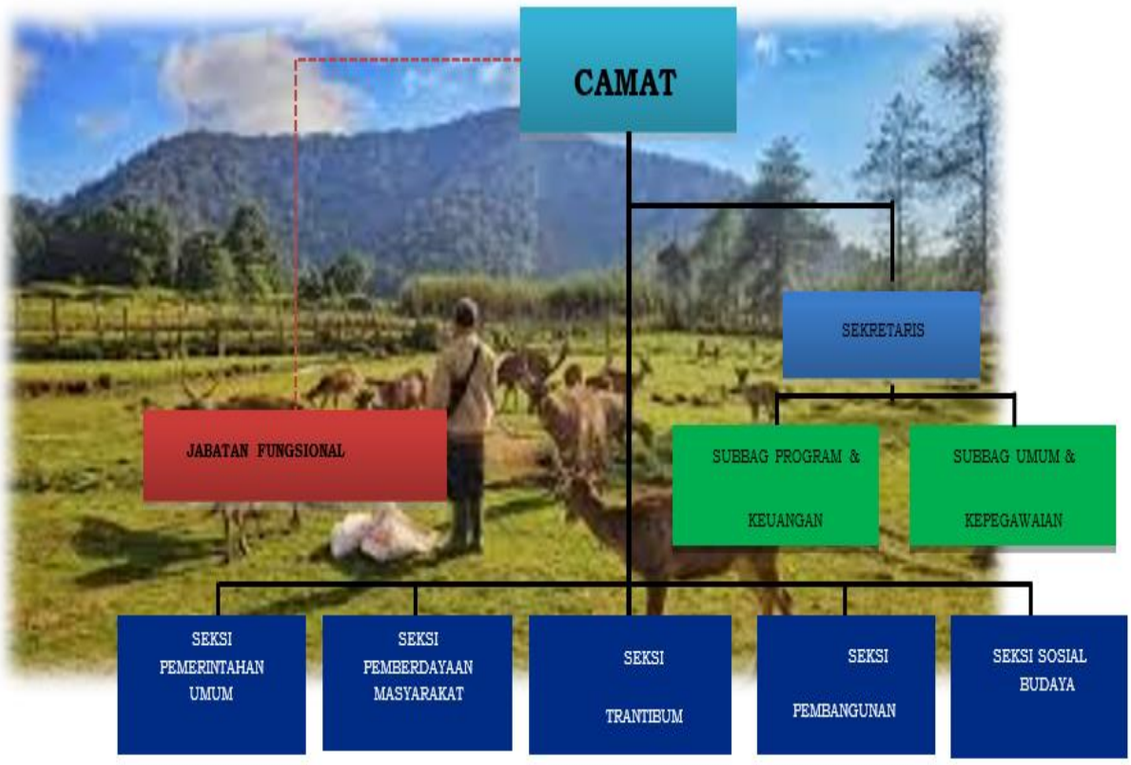
e. Seksi Sosial Budaya,

f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum,

g. Jabatan Fungsional. Gambaran organisasi tersebut dapat diperjelas melalui struktur organisasi Kecamatan Rancabali sebagai berikut:

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung

Gambar. 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Rancabali



Sumber Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, Camat mempunyai Tugas melaksanakan wewenang Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan Otonomi daerah.

Pelaksanaan tugas pokok Camat sebagai Perangkat Daerah adalah membantu Bupati dalam bidang Pemerintahan Daerah yang kegiatannya mengacu pada Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati Bandung Kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi bidang-bidang :

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Kesehatan
3. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
4. Bidang Sosial
5. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
6. Bidang Pertanahan
7. Bidang Lingkungan Hidup
8. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10. Bidang Komunikasi dan informatika
11. Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
12. Bidang Penanaman Modal
13. Bidang Kepemudaan dan Olahraga
14. Bidang Kebudayaan
15. Bidang Pariwisata
16. Bidang Pertanian

Maksud dilimpahkannya sebagai wewenang Bupati kepada Camat adalah untuk mempertegas dan memberi kepastian hukum bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat sebagai Perangkat Daerah. Adapun tujuan dilimpahkannya sebagain wewenang Bupati kepada Camat adalah untuk mengingatkan Pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja dan Akuntanbilitas Camat.

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, perlengkapan, kepegawaian, pengumpulan data, pelaporan, bahan perumusan rencana program, keuangan serta pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada Camat dan semua unsur di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

1. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Camat membawahkan seorang Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta, evaluasi dan pelaporan serta mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
b. Pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
c. Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
d. Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
e. Pengoordinasian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
f. Penyelenggaraan koordinasi, Pertical dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
g. Penyelenggaraan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja.

Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya membawahkan 2 (dua) subbagian yaitu Subbagian Program dan Keuangan dan Subbagian Umumdan Kepegawaian. Sekretaris sebagai Pejabat Penilai Kinerja melaksanakan penilaian kinerja pada kedua Subbagian tersebut.

2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian (Kasubbag). Kasubbag Program dan keuangan mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan rencana dan program serta pengelolaanadministrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kasubbag Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Kecamatan dan Daerah;
b. pelaksanaan koordinasi dengan Sub Bagian dan Seksi untuk penyusunandan penetapan rencana kerja Kecamatan;
c. pelaksanaan koordinasi dengan Subbag Umum dan Kepegawaian untuk penyusunan tugas dan fungsi Kecamatan;
d. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
e. pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi untuk pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;

f. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan Kecamatan;
g. pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi penyusunan program dan keuangan Kecamatan; dan
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian kinerja SubbagianProgram dan Keuangan.

3. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian (Kasubbag). Kasubbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kasubbag Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
b. pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi untuk penyusunan danpenetapan tugas dan fungsi Kecamatan;
c. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/ 20 erti, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;
d. pelaksanaan koordinasi, Pertical dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Kepala Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (Kasi). Kasi Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Seksi Pemerintahan dapat menyeleggarakan program-program sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan

kegiatan sebagai berikut:

b. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan subkegiatan sebagai berikut:
c. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait; dan
d. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
e. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dengan subkegiatan sebagai berikut:

a) Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan;
b) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan; dan
c) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kegiatan Fasilitasi,
g. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan subkegiatan:

- Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan AsetDesa;
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan PermusyawaratanDesa;
- Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
- Fasilitasi Kerja Sama Antar desa dan Kerja Sama Desa Dengan PihakKetiga;
- Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang DesaSerta Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (Kasi). Kasi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerjaSeksi Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dapat melaksanakan Program-Program sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan subkegiatan:

a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;

b) Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan; dan

c) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan subkegiatan;

a) Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.

b) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat.

c) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga.

d) Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri.

e) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah.

f) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

g) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

h) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup

Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya.

i) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup.
j) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam.
k) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga.
l) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas.

b. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

6. Kepala Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (Kasi). Kasi Pembangunan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Seksi Pembangunan dapat melaksanakan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di mana program tersebut diselenggarakan untuk kegiatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum dan kegiatan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta.

Selain melaksanakan program tersebut, Kepala Seksi Pembangunan dapat melaksanakan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kegiatan Fasilitasi,

Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Adapun sub kegiatan yang dapat dilaksanakan yaitu:

a. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa;
b. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
c. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan;

7. Kepala Seksi Sosial Budaya

Seksi Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (Kasi). Kasi Sosial Budaya mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis

operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Sosial Budaya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Seksi Sosial Budaya dapat melaksanakan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Program tersebut diselenggarakan untuk kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah.

Selain program tersebut, Kepala Seksi Sosial Budaya dapat melaksanakan program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan subkegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
2. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan;

Kemudian, Kepala Seksi Sosial Budaya dapat melaksanakan program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan subkegiatan Fasilitasi. Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan.

8. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (Kasi). Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dapat menyeleggarakan program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Koordinasi upaya penyelenggaraan petentraman dan ketertiban umum dengan subkegiatan sinergitas dengan POLRI, TNI, dan instansi 24 pertical di wilayah Kecamatan dan kegiatan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan subkegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Selain program tersebut, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum dapat melaksanakan program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan subkegiatan sebagai berikut:

a. Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
b. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

9. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Kecamatan secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab langsung kepada Camat. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok Jabatan Fungsional dapat dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior dan ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kecamatan.

Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan dari sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Rancabali

a. Sumberdaya Manusia

Kecamatan Rancabali dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung oleh 36 orang pegawai, terdiri dari 18 orang (PNS), 5 orang pegawai tidak tetap (Non PNS), 2 orang PPPK 2 orang petugas: pelayanan (Disdukcapil), 5 orang Satpol PP dan 5 orang Linmas. Apabila dibandingkan dengan beban kerja, hasil analisis jabatan dan kebutuhan organisasi yang ada, perlu adanya peningkatan kapasitas SDM, baik melalui Pelatihan atau penambahan wawasan melalui pembinaan aparatur terhadap pengetahuan Perundang-undangan maupun terhadap teknis pekerjaannya sehingga dalam menjalankan tugasnya dapat menunjang terhadap Target Capaian. Keadaan personil Kecamatan Rancabali per Tanggal 31 Agustus 2025 adalah sebagaimana berikut:

Tabel 2.1 Daftar Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Rancabali Berdasarkan Jabatan, Pangkat/Golongan

No.	Nama	Jabatan	Jumlah	Pangkat / Golongan
1	MAMET SLAMET, S.Ip., M.Si. NIP.19750616 201001 1 010	Camat Rancabali	1 Orang	Penata Tk.I, III/d
2	IWAN RIDWAN, S.IKom., M.AP. NIP.19700514 199003 1 003	Sekretaris Kecamatan	1 Orang	Pembina, IV/a
3	DIKDIK ZAKI GINANI, S.Ag. NIP.19770926 200801 1 012	Kasi Pemberdayaan	1 Orang	Penata Tk.I, III/d
4	ADE SURYANA, S.Sos. NIP.19721006 200701 1 006	Kasi Trantib	1 Orang	Penata, III/c
5	CEPI SUMARDI, S.E. NIP.19780124 200801 1 002	Kasi Pembangunan	1 Orang	Penata, III/c
6	ATE SUNARYO, S.Sos. NIP.19720908 201212 1 003	Kasi Pemerintahan	1 Orang	Penata Muda Tk.I, III/b
7	KOMARA MEGA PERMANA, S.M. NIP.19861019 201412 1 001	Kasi Sosial Budaya	1 Orang	Penata Muda Tk.I, III/b
8	TB. TEDI HERMAWAN, SE. NIP.19720208 200701 1 010	Kasubag Program Dan Keuangan	1 Orang	Penata Muda Tk.I, III/b
9	AJO SUARJO, S.M. NIP.19790207 201001 1 006	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	1 Orang	Penata Muda, III/a
10	DENI SUKENDRA, S.M. NIP.19710306 200801 1 004	Pengolah Data Dan Informasi Pada Sub Bagian Umpeg	1 Orang	Penata Muda, III/a
11	RASMAN PRIYATNA, S.M. NIP.19720210 201001 1 002	Pengolah Data Dan Informasi Pada Sub Bagian Umpeg	1 Orang	Penata Muda, III/a
12	DASEP NIP.19700425 200801 1 004	Pengolah Data Dan Informasi Pada Kasi Pembangunan	1 Orang	Penata Muda, III/a
13	GUNAWAN S. NIP.19710930 200906 1 002	Penelaah Teknis Kebijakan	1 Orang	Pengatur Tk.I, II/d
14	HANGGA ANUGRATYAS PRATAMA, A.Md. NIP.19870113 202012 1 001	Pengolah Data Dan Informasi Pada Sub Bagian Progkeu	1 Orang	Pengatur Tk.I, II/d

No.	Nama	Jabatan	Jumlah	Pangkat / Golongan
15	IKA NURISLAMI, A.Md. NIP.19970831 202012 2 001	Pengolah Data Dan Informasi Pada Kasi Pemerintahan	1 Orang	Pengatur Tk.I, II/d
16	LELLY SITI NOORPELITA NIP.19690428 201410 2 002	Penelaah Teknis Kebijakan	1 Orang	Pengatur, II/c
17	ATIM MULYANA NIP.19770217 201412 1 001	Pengolah Data Dan Informasi Pada Sub Bagian Umpeg	1 Orang	Pengatur Muda Tk.I, II/b
18	SANDI MOHAMAD SOLEH, A.Md. NIP.19940730 202421 1 003	Terampil Arsiparis	1 Orang	PPPK 2024 / JF VII
19	MUHAMAD RIDWAN, S.Kom. NIP.20000417 202505 1 005	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	1 Orang	CPNS 2025 Penata Muda, III/a
20	SARIP HIDAYAT NIP.19770305 202521 1 004	Pengadministrasi Perkantoran	1 Orang	PPPK 2025 / JF V

Sumber data Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Rancabali 31 Agustus 2025

Tabel 2.2 Daftar Tenaga Non ASN Kecamatan Rancabali

No.	Nama	Jabatan	Jumlah	Pendidikan
1	RINI FITRIA NURAENI, S.H	Pengelola Administrasi Pemberdayaan Masyarakat	1 Orang	S1
2	TERESHA PUSPITA, S.Pd.	Pengelola Pelayanan Umum	1 Orang	S1
3	ADITYA GIFHARI SUNARYA, S.SIKOM	Pengelola Administrasi Sosial dan Budaya	1 Orang	S 1
4	DITA IRIANA YUSUF, SH	Pengelola Pelayanan Umum	1 Orang	S 1

Sumber data Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Rancabali 31 Agustus 2025

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Rancabali Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1	Gol IIC	0	1	1	5%
2	Gol II A	0	0	0	0%
3	Gol IID	2	1	3	16%
4	Gol IIIA	5	0	5	26%
5	Gol IIIB	3	0	3	16%
6	Gol IIIC	2	0	2	11%
7	Gol IIID	2	0	2	11%
8	Gol IVA	1	0	1	5%
9	VII	1	0	1	5%
10	V	1	0	1	5%

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
	Jumlah	17	2	19	100.0%

Sumber data Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Rancabali 31 Agustus 2025

Dari data tabel 2.3 tersebut diatas terlihat bahwa pegawai ASN didominasi oleh laki-laki = 89% sedangkan untuk pegawai ASN jenis kelamin perempuan hanya 11%.

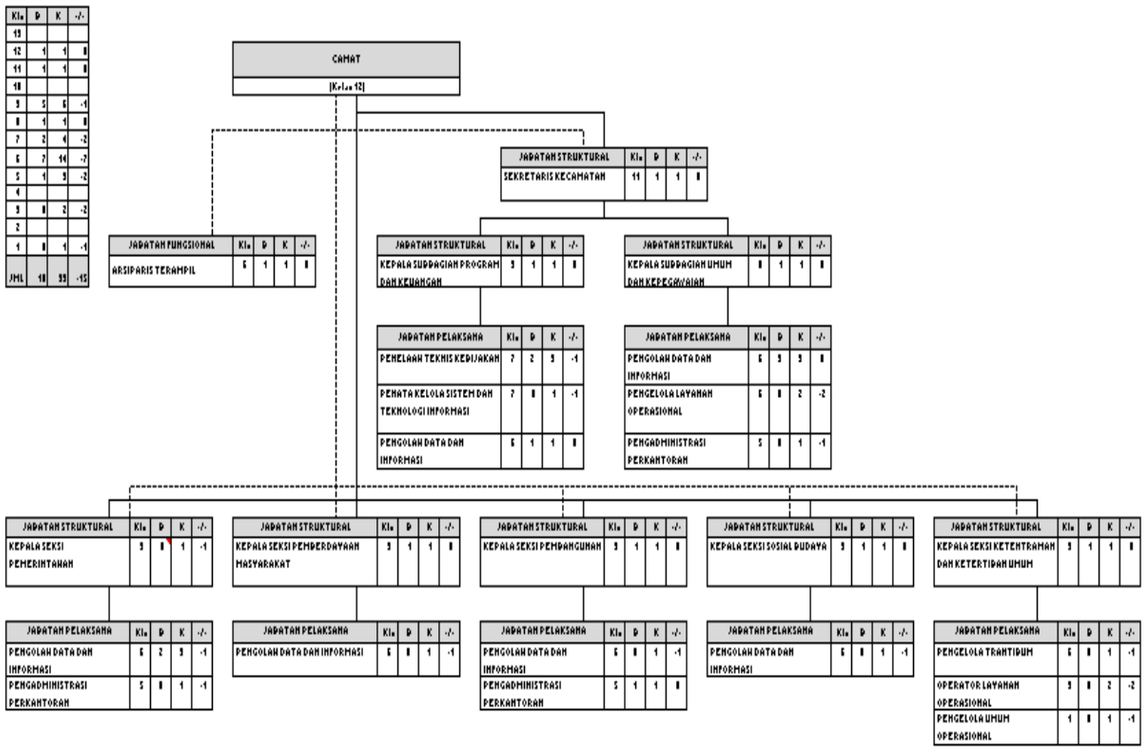
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Rancabali yang telah mengikuti pendidikan struktural dan jabatan esselon berdasarkan jenis kelamin

No.	Esselon	Jumlah Pegawai	Tingkat Diklatpim	Jumlah Pegawai yang Mengikuti	Laki-laki	Perempuan	%
1.	III a	1 Orang	III	1	1	0	14%
2.	III b	1 Orang	III	1	1	0	14%
3.	IV a	3 Orang	IV	2	2	0	42 %
	IV b	2 Orang	IV	2	2	0	28 %
	Jumlah	7 Orang		6	6	0	100,00%
	%				100%	0%	

Sumber data Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Rancabali 31 Agustus 2025

Berdasarkan Tabel 2.4 di atas maka pegawai Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung yang telah mengikuti pendidikan Struktural dan jabatan esselon menurut Jenis kelamin 100% didominasi oleh Laki-laki adapun berdasarkan data tersebut diatas secara keseluruhan yang telah mengikuti jabatan Esselon Tahun 2025, sebagai berikut: Esselon III A sebanyak 1 Orang = 14% dari total pejabat struktural, Esselon III B sebanyak 1 Orang = 14%, Esselon IV A sebanyak 3 Orang = 42% dari total pejabat struktural, Esselon IV B sebanyak 2 orang = 28% dari total pejabat struktural. Berdasarkan data tersebut di atas untuk pejabat struktural Esselon IV A yang belum mengikuti pendidikan struktural berjumlah 1 orang.

Gambar 2.2 Peta Jabatan Kecamatan Rancabali Tahun 2025



Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Rancabali Tahun 2025

Dari gambar 2.2 di atas Jumlah Pegawai yang dibutuhkan saat ini adalah 33 personil, sudah tersedia sebanyak 18 personil sehingga terdapat kekurangan sebanyak 15 Personil sebagaimana Gambar 2.2 Peta Jabatan Kecamatan Rancabali Tahun 2025. Pegawai terutama pada level Jabatan golongan III pengelola / pelaksana golongan II, dan Tenaga Operator. Kecamatan Rancabali telah berupaya setiap tahun mengusulkan penambahan personil dan mengusulkan analisa beban kerja, namun terkait dengan kebijakan rekrutmen pegawai maka pemenuhan kebutuhan pegawai dilakukan secara bertahap. Sebagai solusi jangka pendek untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Rancabali melakukan optimalisasi dengan memaksimalkan sumber daya yang ada dengan tambahan tenaga non-ASN.

b. Aset Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan peningkatan pelayanan publik sangat diperlukannya akan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja pemerintahan daerah dalam pelaksanaan kewajibannya sebagai peneyelenggara pelayanan publik. Ranwal Renstra Kecamatan Rancabali Tahun 2025-2029 Adapun dukungan sarana dan prasarana perangkat daerah terakumulasi dalam penetapan laporan penggunaan Barang Milik Daerah pada satuan perangkat daerah.

Tabel 2.5 Data Hasil Rekonsiliasi Aset Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2024 Kecamatan Rancabali

BERITA ACARA REKONSILIASI ASET
PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2024
KECAMATAN RANCABALI

Pada Hari ini Senin tanggal Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima
Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : DENI SUKENDRA, S.M
   Jabatan : Pengurus Barang
   NIP. : 19710306 200801 1 004

2. Nama : WAHYUDIN, ST., ME
   Jabatan : Kabid Pengelolaan BMD
   NIP. : 19760513 200901 1 002

Telah melakukan Rekonsiliasi Aset dengan hasil sebagai berikut :

NO.	JENIS ASET	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024	AKUMULASI PENYUSUTAN SD 31 DESEMBER 2024	NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2024
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	1.715.761.294	1.551.717.354	164.043.940
3	Gedung dan Bangunan	2.460.760.608	617.432.569	1.843.328.039
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	194.863.000	194.863.000	-
5	Aset Tetap Lainnya	19.738.800	-	19.738.800
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-		-
	Total Aset Tetap	**4.391.123.702**	**2.364.012.923**	**2.027.110.779**
7	Aset Tak Berwujud			-
8	Aset Lain-Lain/Rusak Berat	137.790.434	133.941.234	3.849.200
9	Aset yang dimanfaatkan pihak lain			-
	Total Aset Lainnya	**137.790.434**	**133.941.234**	**3.849.200**
	Total Aset Tetap + Aset Lainnya	**4.528.914.136**	**2.497.954.157**	**2.030.959.979**

Rincian mutasi terlampir
Demikian Berita Acara Rekonsiliasi Aset ini dibuat dengan sebenarnya.

Soreang, 6 Januari 2025

Kepala Bidang Pengelolaan BMD

WAHYUDIN, ST., ME
NIP. 19760513 200901 1 002

Pengurus Barang

DENI SUKENDRA,S.M
NIP. 19710306 200801 1 004

Mengetahui,
Kepala Bidang Akuntansi
Dan Pelaporan Keuangan

SIGIT BUDIANTO, SE
NIP. 19690903 200701 1 010

Sumber: Hasil Analisis data Pengelola Pemanfaatan BMD Kecamatan Rancabali Per 31 Desember 2024

Sedangkan persentase sarana dan prasarana dengan pengelompokan kondisi aset, selengkapnya disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.6 Data Klasifikasi Aset Berdasarkan Kondisi

NO.	KLASIFIKASI KONDISI ASET	NILAI ASET	PERSENTASE
1	Baik	1,888,792,780.47	93%
2	Kurang Baik	0	0%
3	Rusak Berat	142,167,198.53	7%
JUMLAH		2,030,959,979.00	100%

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Rancabali tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.5 dan tabel 2.6 di atas, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Rancabali telah optimal dalam mengelola Barang Milik Daerah. Hal itu bisa dilihat dari persentase Barang Milik Daerah dengan kondisi baik sebesar 93%. terhadap total Barang Milik Daerah. Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Tabel 2.7 Data Aset Tanah

N I H I L

Aset Tanah Kecamatan Rancabali Nihil sebagaimana tabel di atas dikarenakan bangunan berdiri di tanah HGU PTPN VIII Rancabali dengan status Pinjam Pakai seluas 2.195,41 m2.

Aset Gedung dan Bangunan

Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan guna memperbaiki/mengganti sarana dan prasarana yang sudah Rusak Berat/tidak lagi berfungsi secara optimal serta perlu dianggarkan secara rutin. Adapun pemeliharaan BMD yang rutin dilakukan setiap tahun direncanakan dan dilaksanakan sesuai skala prioritas pemeliharaan yang direncanakan.

2.1.3. Kinerja Penyelengaraan Pelayanan Kecamatan Rancabali

Kinerja penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Rancabali dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung yang telah tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2021-2026 dan Perubahan Renstra Kecamatan Rancabali tahun 2021-2026.

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan saran dan tujuan yang telah ditetapkan Kecamatan Rancabali dalam rangka mewujudkan misi dan merealisasikan visi Kecamatan.

2.1.3.1. Data-Data dan Informasi Terkait Pelaksanaan Urusan yang menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Rancabali

- Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Rancabali Semester 1 Tahun 2025

Kode	Wilayah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
320440	RANCABALI	27,939	26,645	54,584

Kode	Wilayah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
3204402001	PATENGAN	2,837	2,707	5,544
3204402002	SUKARESMI	5,376	5,021	10,397
3204402003	INDRAGIRI	1,974	1,820	3,794
3204402004	CIPELAH	4,745	4,543	9,288
3204402005	ALAMENDAH	13,007	12,554	25,561

Sumber Data : Data Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester 1 Tahun 2025

- Jumlah Rt/Rw Di Wilayah Kecamatan Rancabali

Kode	Wilayah	Jumlah Dusun	Jumlah RT	Jumlah RW
3204402001	PATENGAN	4	38	13
3204402002	SUKARESMI	4	50	14
3204402003	INDRAGIRI	4	33	10
3204402004	CIPELAH	4	53	15
3204402005	ALAMENDAH	5	112	30

Sumber Data : Data hasil analisis Kecamatan Rancabali tahun 2025

- Luas Wilayah Kecamatan Rancabali

Nomor	Desa	Luas Wilayah
1	PATENGAN	3.073 ha
2	SUKARESMI	3.427,12 ha
3	INDRAGIRI	2642,16 ha
4	CIPELAH	1047 ha
5	ALAMENDAH	505,6 ha
Jumlah		10.694.88 ha

Sumber Data : Data hasil analisis Kecamatan Rancabali tahun 2025

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Rancabali memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi prioritas dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayahnya. Pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan merupakan bagian krusial dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan berkelanjutan. Kecamatan Rancabali, sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Bandung melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah melalui pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat

dimaksudkan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan dan mengoptimalkan pelayanan publik di kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan Masyarakat. Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung nomor 76 tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. Rincian Sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat dituangkan dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah. Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut bersifat delegasi yang terdiri atas kewenangan seragam untuk seluruh Camat dan kewenagan tidak seragam untuk Camat tertentu. Kewenangan seragam untuk seluruh Camat terdiri dari 16 (enam belas) urusan dan 28 (dua puluh delapan) kewenangan yang dilimpahkan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.8 Rincian Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat

No	Urusan Pemerintahan	Kewenangan yang dilimpahkan
1	PENDIDIKAN	1. Fasilitasi keikutsertaan warga masyarakat dalam pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan
		2. Monitoring dan fasilitasi kelayakan sarana dan prasarana pendidikan dasar di wilayah kecamatan
		3. Fasilitasi penanggulangan masalah kesehatan masyarakat tingkat kecamatan
2	KESEHATAN	4. Monitoring dan fasilitasi kelayakan sarana dan prasarana Puskesmas, Poskesdes, dan Puskesmas Pembantu di wilayah kecamatan
3	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	5. Fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4	SOSIAL	6. Penanganan pertama penyediaan kebutuhan dasar mendesak masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PKKS)
		7. Penyelenggaraan pembinaan organisasi perempuan tingkat kecamatan

No	Urusan Pemerintahan	Kewenangan yang dilimpahkan
5	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8. Monitoring dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap Perempuan dan anak dari tindak kekerasan
6	PERTANAHAN	9. Fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum
7	LINGKUNGAN HIDUP	10. Pengelolaan sampah skala kecamatan
		11. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) skala kecamatan
		12. Fasilitasi pembinaan desa/kelurahan berbudaya lingkungan
		13. Fasilitasi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
8	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14. Monitoring dan fasilitasi penyelenggaraan layanan dan kelayakan sarana prasarana yang digunakan serta evaluasi kinerja petugas operator dalam pelayanan dokumen kependudukan dan catatan sipil
9	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15. Pelantikan Kepala Desa hasil pemilihan, Pergantian Antar Waktu dan Penjabat Kepala Desa
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	16. Monitoring dan fasilitasi kelayakan akses jaringan internet lingkungan kantor Kecamatan, Desa/Kelurahan dan fasilitas umum di wilayah kecamatan
11	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	17. Fasilitasi pengembangan koperasi dan UMKM skala kecamatan
		19. Fasilitasi dan pendampingan pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB)
		20. Monitoring kegiatan pemanfaatan tanah sesuai perizinan yang diterbitkan di wilayah kecamatan
12	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	21. Pembinaan keolahragaan tingkat kecamatan
		22. Pembinaan kepemudaan tingkat kecamatan
13	KEBUDAYAAN	23. Pemajuan seni dan budaya tingkat kecamatan
		24. Penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya tingkat kecamatan
14	PARIWISATA	25. Pengembangan Kompetensi dan budaya lokal tingkat kecamatan sebagai destinasi wisata
		26. Fasilitasi pengembangan desa wisata dan kampung wisata
		27. Pengembangan ekonomi kreatif bidang pariwisata skala kecamatan
15	PERTANIAN	28. Monitoring dan fasilitasi kelayakan sarana dan prasarana pertanian

Sumber: Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023

a. Instrumen Pendukung Kinerja Kecamatan Rancabali

Untuk tahun 2025-2029 kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung yang mendukung terhadap kinerja pelayanan kecamatan adalah Pemanfaatan teknologi informasi selayaknya dimanfaatkan dengan optimal dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Pemanfaatan tersebut jika dilaksanakan dapat mendukung proses pelaksanaan pemerintahaan yang terbukadan transparan serta mempermudah masyarakat dalam mendapatkan akses pelayanan. Kecamatan Rancabali secara bertahap melakukan pemanfaatan tersebut dalam upaya peningkatan kinerjanya. Dalam pelaksanannya, Kecamatan Rancabali melakukan inovasi dan melakukan pemanfaatan teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Rancabali sebagai instansi kewilayahan.

Adapun instrument Pendukung untuk menunjang optimalisasi Pealayanan Publik adalah:

1. Program Inovasi Pelayanan KARASA (Karyawan Kecamatan Ngantor di Wilayah Desa)

   Pelayanan KARASA (Karyawan Kecamatan Ngantor Di Wilayah Desa) merupakan inovasi yang dilakukan Karyawan Kecamatan Rancabali Ngantor di Desa yang dimulai pada akhir tahun 2023 dalam upaya peningkatan pelayanan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Rancabali dan sebagai upaya peningkatan pola pengelolaan infoirmasi administrasi kependudukan. Pelayanan ini mencakup pelayanan administrasi terpadu yaitu

1 . Pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

2. Fasilitasi pelayanan Pendaftaran nomor induk berusaha.

3. Pendataan RUTILAHU.

4. Pendataan sarana Prasarana Umum Metigasi Kebencanaan.

5. Pendataan Anak Putus sekolah.

6. Pendataan Anak Stunting.

7. Pendataan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Wilayah Kecamatan Rancabali.

Gambar 2.3

Dokumentasi Kegiatan “KARASA”



Sumber: hasil Laporan Kegiatan Inovasi Kecamatan Rancabali -Pelayanan Publik melalui Program Karyawan Ngantor di Desa “KARASA” Tahun 2024

2. Dukungan Media Sosial

Instagram dan Facebook Kecamatan Rancabali

Sebagai upaya peningkatan keterbukaan informasi publik, Kecamatan Rancabali memanfaatkan media sosial Instragram dan Facebook serta media sosial lainnya sebagai media penyebaran informasi program dan informasi publik, serta sebagai sarana interaksi dua arah antara pemerintah Kecamatan Rancabali dengan masyarakat sehingga keterbukaan antara permintaan masyarakat dengan pelayanan yang diberikan Kecamatan Rancabali dapat selaras.

Pemanfaatan teknologi informasi juga diharapkan sejalan dengan usaha pemerintah dalam implementasi reformasi birokrasi baik dari penyebaran informasi layanan maupun penyebaran informasi tata laksana pemerintahan.

Gambar 2.4

Profil Instagram dan Facebook Kecamatan Rancabali



Sumber: Pengelola Media social Kecamatan Rancabali

b. Potensi Daerah

Potensi utama Kecamatan Rancabali adalah sektor pariwisata alam dan agrowisata, seperti Kawah Putih, Situ Patenggang, dan perkebunan teh, serta potensi pertanian, termasuk tanaman sayur, buah seperti stroberi, dan peternakan. Wilayah ini berada di dataran tinggi dengan iklim tropis yang cocok untuk pengembangan pertanian dan agrowisata.

1. Potensi Pariwisata

- Objek Wisata Populer:

Rancabali memiliki banyak tempat wisata alam yang indah, seperti Kawah Putih, Situ Patenggang, Pemandian Walini, Perkebunan Teh Rancabali, dan Ranca Upas.

- Agrowisata:

Keberadaan kebun teh dan perkebunan stroberi yang bisa dipetik langsung oleh pengunjung menjadi daya tarik agrowisata yang kuat di wilayah ini.

- Konservasi dan Edukasi:
Terdapat pusat konservasi hewan seperti rusa dan Oa Jawa, serta tempat-tempat seperti Situ Sinumbra, yang menambah nilai edukasi dan konservasi dari pariwisata Rancabali.

2. Potensi Pertanian dan Peternakan

- Komoditas Pertanian:

Desa Alamendah, yang merupakan bagian dari Rancabali, dikenal sebagai desa agronomis yang memproduksi beragam sayur dan buah, seperti daun bawang, wortel, seledri, dan stroberi.

- Tanaman Holtikultura:

Dataran tinggi Rancabali sangat cocok untuk pengembangan tanaman holtikultura, termasuk sayuran seperti bawang putih dan asparagus.

- Peternakan:
Wilayah ini juga memiliki potensi di sektor peternakan, dengan adanya pembudidayaan sapi perah, sapi daging, kambing, dan kelinci.

3. Potensi Ekonomi Lokal

- Pariwisata Mendorong Perekonomian:

  Sektor pariwisata, terutama di Desa Patengan, memberikan dorongan signifikan bagi perekonomian warga melalui penjualan makanan, tiket masuk, dan oleh-oleh.

- Pusat Perekonomian Petani:
  Mayoritas penduduk Desa Alamendah bekerja sebagai petani dan pedagang, yang menunjukkan peran ekonomi penting dari sektor pertanian.

4. Karakteristik Geografis

- Dataran Tinggi:

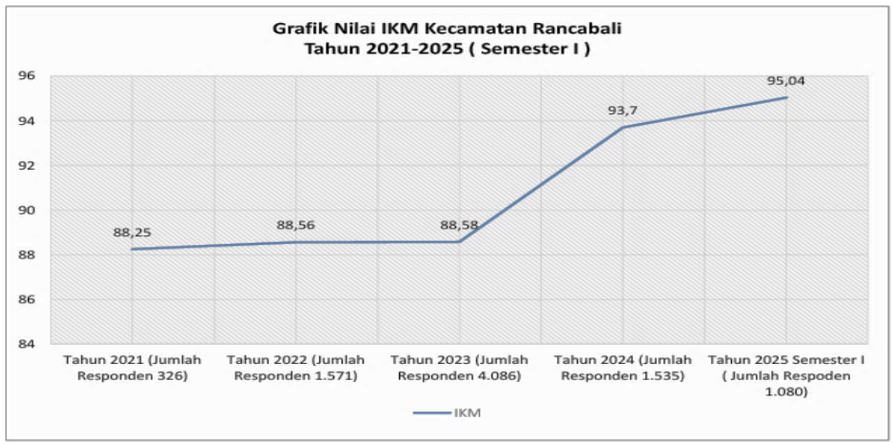
  Berada di dataran tinggi dengan ketinggian 1300 hingga 2350 meter di atas permukaan laut, memberikan suhu udara yang sejuk dan cocok untuk berbagai aktivitas.

- Iklim Tropis:
  Iklimnya tropis yang dipengaruhi angin muson dengan curah hujan yang cukup tinggi dan suhu rata-rata 19-24°C.

2.1.3.2. Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan IKU dan IKK Tahun 2021-2024

Dalam melaksanakan Program Kegiatan terutama pelayanan langsung terhadap Masyarakat perlu adanya penilaian yang objektif terutama penilaian langsung dari masyarakat dalam hal ini setiap tahunnya Kecamatan Rancabali melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi *E-SKM (e-skmbandungkab.go.id)* dengan Indek Kepuasan Masyarakat sebagai Orientasinya dan dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) hasil rata-rata pencapaian melampaui target, hal tersebut memberikan gambaran bahwa dengan sumber daya yang ada Kecamatan Rancabali dapat memberikan layanan meskipun masih terdapatnya kekurangan dan kelemahannya untuk perbaikan pada 5 (lima) tahun mendatang melalui perencanaan Perubahan Rencana Strategis dengan visi dan Misi Kabupaten Tahun 2025-2029. Gambar Berikut adalah grafik Survei Kepuasan Masyarakat dari tahun 2021 sampai dengan semester I tahun 2025.

Gambar 2.5 Nilai IKM Kecamatan Rancabali



Sumber: Hasil Analisis nilai IKM tahun 2021-2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi dan peningkatan tren yang positif terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari Tahun 2021 sampai dengan Semester I Tahun 2025 pada Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung.

Tabel 2.9. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Rancabali Tahun 2021-2024

No	Indikator SPM/Standar Nasional	Kondisi Kinerja Awal Periode	TARGET RENSTRA					REALISASI RENSTRA		Proyeksi			Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	74%	73.20%	73.40%	73.60%	73.80%	74%	88.56%	81.95%	93.70%	74%	75%	Capaian Realisasi Nilai IKM telah melampaui target sebesar 20.10% dari nilai target Tabhun 2024
2	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (AKIP)	60 Poin	60 Poin	60.20 Poin	60.40 Poin	60.80 Poin	61 Poin	65.50 Poin	74.80 Poin	80.70 Poin	80.71 Poin	70 Poin	Capaian Realisasi AKIP telah melampaui target sebesar 20.30 poin dari nilai target tahun 2024
3	Presentasse BMD/Aset Dalam Kondisi Baik	60%	60.5%	70%	90%	90%	80%	66.5%	86.37%	96%	96.5%	80.1%	Capaian realisasi BMD telah melampaui target sebesar 0.6 poin dari nilai target tahun 2024
4	Desa Cepat Berkembang									100%	100%	100%	Capaian kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi bantuan keuangan desa serta pembinaan administrasi desa telah berkontribusi terhadap tercapainya realisasi target

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Rancabali tahun 2025

2.1.3.3. Penyajian Hasil Evaluasi Capaian dan Kinerja Yang Menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Rancabali Pada Renstra Tahun 2021-2026 Mencakup Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan

Dalam rangka memastikan keselarasan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Kecamatan Rancabali melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja Renstra Tahun 2021–2026. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi kebijakan yang

dilaksanakan telah berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja kegiatan (IKK), serta output dan outcome pembangunan yang menjadi tanggung jawab kecamatan.

Dengan penyajian hasil evaluasi yang terstruktur, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Rancabali Tahun 2021–2026. Evaluasi ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, tetapi juga menjadi landasan penting dalam penyusunan Renstra Kecamatan Rancabali Tahun 2025-2029, sehingga lebih adaptif terhadap tantangan, sesuai kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung.

Adapun hasil Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran selama 5 (lima) tahun kami sajikan sebagai berikut:

Tabel 2.10 Kinerja Pencapaian Pelayanan Kecamatan Rancabali

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026										Reallsasi Capaian Tahun 2021-2026										Rasio Capian Pada Tahun 2021-2026				
					2021		2022		2023		2024		2025		2021		2022		2023		2024		2025		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	16	17	18	19
UNSUR KEWILAYAHAN																												
KECAMATAN																												
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP			64.1	poin	60	poin	60	poin	60.6	poin	78	poin	64	poin	65.5	poin	74.8	poin	80.7	poin	0	poin	100%	109%	124%	133%	0%
	Persentse BMD Dalam Kondisi Baik	Persentse BMD Dalam Kondisi Baik			N/A		81	%	82	%	83	%	86	%	N/A		81	%	82	%	83	%	0	%	100%	100%	100%	100%	0%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	0	%	100%	100%		100%	0%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	dok	2	dok	2	dok	2	dok	2	dok	2	dok	2	dok	2	dok	2	dok	2	dok	0	dok	20%	100%	100%	100%	0%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7	dok		dok	1	dok	2	dok	2	dok	2	dok	0	dok	1	dok	2	dok	2	dok	0	dok	0%	100%	100%	100%	0%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	9	dok	1	dok	2	dok	2	dok	2	dok	2	dok	1	dok	2	dok	2	dok	2	dok	0	dok	11%	100%	100%	100%	0%
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	7	dok	1		1	dok	2	dok	2	dok	1	dok	1	0	1	dok	2	dok	2	dok	0	dok	14%	100%	100%	100%	0%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9	dok	5	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	5	dok	1	dok	1	dok	1	dok	0	dok	56%	100%	100%	100%	0%
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	dok		dok							1	dok	0	dok	0	0	0	0	0	0	0	dok	0%	0%	0%	0%	0%
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	dok											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026										Reallsasi Capaian Tahun 2021-2026										Rasio Capian Pada Tahun 2021-2026				
					2021		2022		2023		2024		2025		2021		2022		2023		2024		2025		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	16	17	18	19
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100		100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	0	%	100%	100%	100%	100%	0%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	0	bulan	20%	100%	100%	100%	0%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	0	dok	20%	100%	100%	100%	0%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20	lap	4	lap	4	lap	4	lap	4	lap	4	lap	4	lap	4	lap	4	lap	4	lap	0	lap	20%	100%	100%	100%	0%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	laporan	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	0	lap	20%	100%	100%	100%	0%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	0	%	100%	100%	100%	100%	0%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	paket	1	paket	0		0		1	paket			1	paket	0	0	0	0	1	paket	0	0	50%	0%	0%	100%	0%
	Kooedinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Lepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Lepegawaian	3	dok	0	dok	1	dok	1	dok	1	dok			0	dok	1	dok	1	dok	1	dok	0	0	0%	100%	100%	100%	0%
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	0	dok	20%	100%	100%	100%	0%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	296	orang	68	org	76	org	76	org	38	org	38	org	68	org	76	org	76	org	38	org	0	org	23%	100%	100%	100%	0%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	0	%	100%	100%	100%	100%	0%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	paket	1	paket	1	paket	1	paket	1	paket	1	paket	1	paket	1	paket	1	paket	1	paket	0	paket	20%	100%	100%	100%	0%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	paket	1	paket	1	paket	1	paket	1	paket	1	paket	1	paket	1	paket	1	paket	1	paket	0	paket	20%	100%	100%	100%	0%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026										Realisasi Capaian Tahun 2021-2026										Rasio Capian Pada Tahun 2021-2026				
					2021		2022		2023		2024		2025		2021		2022		2023		2024		2025		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	16	17	18	19
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	paket	1	paket	1	paket	1	paket	1	paket	1	paket	1	paket	1	paket	1	paket	1	paket	0	paket	20%	100%	100%	100%	0%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	paket	1	paket	1	paket	1	paket	1	paket	1	paket	1	paket	1	paket	1	paket	1	paket	0	paket	20%	100%	100%	100%	0%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	0	lap	20%	100%	100%	100%	0%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	0	lap	20%	100%	100%	100%	0%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	0	%	100%	100%	100%	100%	0%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	0	bulan	20%	100%	100%	100%	0%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	0	lap	20%	100%	100%	100%	0%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	0	bulan	20%	100%	100%	100%	0%
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	0	%	100%	100%	100%	100%	0%
	Penyusunan perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	0	dok	20%	100%	100%	100%	0%
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah biaya Pengamanan Barang Milik Daerah	60	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	0	bulan	20%	100%	100%	100%	0%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	5	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	0	dok	20%	100%	100%	100%	0%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	5	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	0	lap	20%	100%	100%	100%	0%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Menunjang Urusan Pemerintahan	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	100		100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	0	%	100%	100%	100%	100%	0%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jabatan	Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jabatan	0	unit											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	paket	1	paket	1	paket	1	paket	1	paket	1	paket	1	paket	1	paket	1	paket	1	paket	0	paket	20%	100%	100%	100%	0%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9	unit	3	unit	3	unit	1	unit	1	unit	1	unit	3	unit	3	unit	1	unit	1	unit	0	unit	33%	100%	100%	100%	0%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	0	unit											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026										Reallsasi Capaian Tahun 2021-2026										Rasio Capian Pada Tahun 2021-2026				
					2021		2022		2023		2024		2025		2021		2022		2023		2024		2025		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	16	17	18	19
	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya																											
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	unit	5	unit	5	unit	5	unit	5	unit	5	unit	5	unit	5	unit	5	unit	5	unit	0	unit	20%	100%	100%	100%	0%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	unit	3	unit	1	unit	1	unit	1	unit	1	unit	3	unit	1	unit	1	unit	1	unit	0	unit	43%	100%	100%	100%	0%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	100	poin	73	poin	73	poin	73	poin	73.6	poin	89	poin	73	poin	73	poin	73	poin	74	poin	0	poin	73%	100%	100%	100%	0%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	0	%	100%	100%	100%	100%	0%
	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan denhgan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan denhgan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2	lap					1	lap	1	lap			0	0	0	0	1	lap	1	lap	0	0	0%	0%	100%	100%	0%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	0	dok	20%	100%	100%	100%	0%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	0	lap	20%	100%	100%	100%	0%
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	0	%	100%	100%	100%	100%	0%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5	dok	1	dok	1	0	1		1	####	1	dok	1	dok	1	0	1		1	####	0	dok	20%	100%	100%	100%	0%
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan unit Kerja perangkat	Pesentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan unit Kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	0	%	100%	100%	100%	100%	0%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026										Reallsasi Capaian Tahun 2021-2026										Rasio Capian Pada Tahun 2021-2026				
					2021		2022		2023		2024		2025		2021		2022		2023		2024		2025		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	16	17	18	19
	daerah yang ada di kecamatan																												
	Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Jumlah dokumen Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	3	dok					1	dok	1	dok	1	dok	0	0	0	0	1	dok	1	dok	0	dok	0%	0%	100%	100%	0%
	fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	4	dok	1	dok			1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	0	0	1	dok	1	dok	0	dok	25%	0%	100%	100%	0%
	Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	5	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	0	lap	20%	100%	100%	100%	0%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	0	%	100%	100%	100%	100%	0%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	0	lap	20%	100%	100%	100%	0%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	0	%	100%	100%	100%	100%	0%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	0	%	100%	100%	100%	100%	0%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	0	lap	20%	100%	100%	100%	0%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Terfasilitasi	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	0	%	100%	100%	100%	100%	0%
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	0	lap	20%	100%	100%	100%	0%
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi PemanfaatanTeknologi Tepat Guna	5	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	0	lap	20%	100%	100%	100%	0%
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	0	%	100%	100%	100%	100%	0%
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran	100	kel							50	kel	50	kel	0	0	0	0	0	0	50	kel	0	kel	0%	0%	0%	100%	0%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026										Realisasi Capaian Tahun 2021-2026										Rasio Capian Pada Tahun 2021-2026				
					2021		2022		2023		2024		2025		2021		2022		2023		2024		2025		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	16	17	18	19
	Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																											
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100	kel							50	kel	50	kel	0	0	0	0	0	0	50	kel	0	kel	0%	0%	0%	100%	0%
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100	kel							50	kel	50	kel	0	0	0	0	0	0	50	kel	0	kel	0%	0%	0%	100%	0%
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100	kel							50	kel	50	kel	0	0	0	0	0	0	50	kel	0	kel	0%	0%	0%	100%	0%
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100	kel							50	kel	50	kel	0	0	0	0	0	0	50	kel	0	kel	0%	0%	0%	100%	0%
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	100	kel							50	kel	50	kel	0	0	0	0	0	0	50	kel	0	kel	0%	0%	0%	100%	0%
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	0	%	100%	100%	100%	100%	0%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	0	%	100%	100%	100%	100%	0%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	5	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	0	lap	20%	100%	100%	100%	0%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026										Realisasi Capaian Tahun 2021-2026										Rasio Capian Pada Tahun 2021-2026				
					2021		2022		2023		2024		2025		2021		2022		2023		2024		2025		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	16	17	18	19
	Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																											
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	0	%	100%	100%	100%	100%	0%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	0	lap	20%	100%	100%	100%	0%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	0	%	100%	100%	100%	100%	0%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	0	%	100%	100%	100%	100%	0%
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	370	org	120	org	50	org			100	org	100	org	120	org	50	org	0	0	100	org	0	org	32%	100%	0%	100%	0%
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	5	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	0	dok	20%	100%	100%	100%	0%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	0	dok	20%	100%	100%	100%	0%
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	0	%	100%	100%	100%	100%	0%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Persentase desa yang dibina	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	0	%	100%	100%	100%	100%	0%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026										Realisasi Capaian Tahun 2021-2026										Rasio Capian Pada Tahun 2021-2026				
					2021		2022		2023		2024		2025		2021		2022		2023		2024		2025		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	16	17	18	19
	Pengawasan Pemerintahan Desa																												
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	0	dok	20%	100 %	100 %	100 %	0%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan PendayagunaanAset Desa	5	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	0	dok	20%	100 %	100 %	100 %	0%
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	0	dok	20%	100 %	100 %	100 %	0%

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Rancabali, 2025

Hasil evaluasi capaian Anggaran dan Keuangan Kecamatan Rancabali adalah penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, membandingkan hasil aktual dengan target serta menganalsis efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Pada Tabel di bawah menggambarkan tentang Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Rancabali di mana secara gambaran umum memperlihatkan perjalanan penyelenggaraan anggaran sesuai dengan target yang telah dicapai oleh Kecamatan Rancabali.

Adapun hasil Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran selama 5 (lima) tahun kami sajikan sebagai berikut:

Tabel 2.11 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Rancabali

Uraian Sesuai Kewenangan Daerah	Angggaran Pada Tahun Ke-							Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-						Rata-Rata Pertumbuhan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	21
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,718,314,563	3,870,645,000	4,641,222,769.	4,788,110,792	4,250,289,312	4,688,664,592.	1,718,314,563	4,309,722,758.	3,283,041,099	4,592,148,288	1,086,690,864	100%	111%	71%	96%	26%	32%	81%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26,000,000.00	24,724,400.00	36,568,100.00	36,392,400.00	21,601,000.00	27,381,000.00	26,000,000.00	49,296,281	12,320,000.00	12,830,000	4,080,000	100%	199%	34%	35%	19%	33%	77%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	5,597,500.00	11,629,200.00	4,250,000.00	5,460,000.00	5,460,000.00	0	5,691,100	4,000,000	4,080,000	-	0%	102%	34%	96%	0%	47%	46%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	3,656,500.00	8,685,500.00	2,590,000.00	7,439,000.00	7,439,000.00	-	27,265,581	850,000	2,560,000	2,040,000	0%	746%	10%	99%	27%	18%	176%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	3,885,000.00	5,195,500.00	1,620,000.00	4,260,000.00	4,260,000.00	-	4,852,300	1,190,000	1,320,000	2,040,000	0%	125%	23%	81%	48%	41%	55%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	4,058,000.00	4,445,500.00	1,932,400.00	-	-	-	4,085,300	3,580,000	3,510,000	-	0%	101%	81%	182%	0%	19%	73%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	Rp 3,940,400.00	-	-	-	-	-	3,940,400	-	-	-	0%	100%	0%	0%	0%	20%	20%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26,000,000.00	3,587,000.00	6,612,400.00	26,000,000.00	3,422,000.00	3,422,000.00	26,000,000.00	3,461,600	2,700,000.00	1,360,000.00	-	100%	97%	41%	5%	0%	41%	49%
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	-	510,000.00	1,700,000.00	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	-	-		-	510,000.00	5,100,000.00	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16,567,821.77	3,412,328,000.00	3,988,441,169.00	3,806,265,190.00	3,823,891,712.00	3,823,891,712.	15,000,000	3,778,220,537	2,868,118,103	3,964,609,062	969,858,062	91%	111%	72%	104%	25%	33%	81%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,567,821.77	3,401,224,000.00	3,973,228,969.00	3,798,190,100.00	3,813,043,312.00	3,813,043,312.		3,768,301,837	2,860,959,303	3,952,484,062	969,858,062	0%	111%	72%	104%	25%	33%	62%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,000,000.00	5,484,000.00	4,951,400.00	3,741,800.00	2,338,400.00	2,338,400.00	5,000,000.00	4,346,400	1,698,800	3,450,000	-	100%	79%	34%	92%	0%	33%	61%

Uraian Sesuai Kewenangan Daerah	Angggaran Pada Tahun Ke-							Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-						Rata-Rata Pertumbuhan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	21
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5,000,000.00	3,090,000.00	8,676,400.00	3,060,000.00	8,510,000.00	8,510,000.00	5,000,000.00	3,537,500.00	4,780,000.00	7,480,000.00	-	100 %	114 %	55%	244%	0%	35%	103%
Penyusunan Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5,000,000.00	2,530,000.00	1,584,400.00	1,273,290.00	-	-	5,000,000.00	2,034,800.00	680,000.00	1,195,000.00	-	100 %	80%	43%	94%	0%	23%	63%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45,000,000.00	-	14,727,680.00	24,615,820.00	6,810,000.00	10,130,000.00	39,055,000.00	5,396,000.00	3,740,000.00	5,049,000.00	18,000,000.00	87%	0%	25%	21%	264%	28%	79%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30,000,000.00			19,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	29,250,000.00		-	-	18,000,000.00	98%	0%	0%	0%	1800 %	22%	380%
Koordinasi dan pelaksaaan sistem informasi kepegawaian		-	2,092,400.00	1,260,000.00	-				2,040,000.00	1,190,000.00	-	0%	0%	97%	94%	0%	21%	38%
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		-	6,602,400.00	1,260,000.00	2,560,000.00	5,880,000.00			1,700,000.00	1,280,000.00	-	0%	0%	26%	102%	0%	109%	25%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15,000,000.00		6,032,880.00	3,095,820.00	3,250,000.00	3,250,000.00	9,805,000.00	5,396,000.00	-	2,579,000.00	-	65%	0%	0%	83%	0%	34%	30%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	306,890,000.00	40,901,000.00	143,693,770.00	48,829,760.00	28,502,220.00	28,502,220.00	305,085,500.00	73,381,400.00	65,810,100.00	74,968,000.00	27,540,400.00	99%	179 %	46%	154%	97%	22%	115%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5,000,000.00	2,140,000.00	3,472,000.00	1,985,400.00	1,985,400.00	1,985,400.00	4,798,000.00	2,139,900.00	3,426,000.00	1,897,500.00	1,985,400.00	96%	100 %	99%	96%	100%	23%	98%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	215,000,000.00	12,846,000.00	61,465,770.00	19,652,160.00	10,304,620.00	10,304,620.00	213,587,500.00	48,899,000.00	39,479,100.00	33,766,500.00	12,385,000.00	99%	381 %	64%	172%	120%	19%	167%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15,000,000.00		3,582,000.00	477,200.00	477,200.00	477,200.00	15,000,000.00		3,010,000.00	8,460,000.00	-	100 %	0%	84%	0%	0%	15%	37%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-		412,000.00	2,686,000.00	206,000.00	206,000.00	-		400,000.00	2,540,000.00	-	0%	0%	97%	95%	0%	24%	38%
Fasilitasi kunjungan tamu	21,890,000.00	3,100,000.00	30,090,000.00	11,200,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	21,700,000.00	3,100,000.00	8,400,000.00	11,200,000.00	12,150,000.00	99%	100 %	28%	100%	450%	25%	155%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,000,000.00	22,815,000.00	44,672,000.00	12,829,000.00	12,829,000.00	12,829,000.00	50,000,000.00	19,242,500.00	11,095,000.00	17,104,000.00	1,020,000.00	100 %	84%	25%	133%	8%	32%	70%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	530,608,000	333,940,000	333,608,000	355,444,380	308,204,380	308,204,380	530,608,000	369,637,540	236,356,996	374,243,418	66,712,402	%	111 %	71%	105%	22%	28%	62%

Uraian Sesuai Kewenangan Daerah	Angggaran Pada Tahun Ke-							Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-						Rata-Rata Pertumbuhan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	21
Pengadaan Mebel										1,150,000.00	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	1,000,000.00	2,108,000.00	1,860,000.00	1,860,000.00	1,860,000.00	5,000,000	1,980,000.00	1,711,200.00	1,860,000.00	1,860,000.00	100%	198%	81%	100%	100%	22%	116%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20,000,000.00	16,500,000.00	42,830,000.00	39,224,380.00	39,224,380.00	39,224,380.00	20,000,000.00	13,920,868.00	24,645,796.00	31,971,818.00	4,974,402.00	100%	84%	58%	82%	13%	41%	67%
jasa perbaikan peralatan kerja	20,000,000.00						20,000,000.00										20%	0%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,000,000.00						5,000,000.00										20%	0%
Penyediaan peralatan dan perlengkapa n kantor	215,000,000						215,000,000										20%	0%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	265,608,000	316,440,000.00	288,670,000.00	314,360,000.00	267,120,000.00	267,120,000.00	265,608,000	353,736,672.00	210,000,000.00	339,261,600.00	59,878,000.00	100%	112%	73%	108%	22%	28%	83%
Persentse BMD Dalam Kondisi Baik									85,123,500.00	150,688,808.00	500,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	0	0	11,695,800	5,960,000	5,960,000	5,960,000	0	0	3,060,000	5,870,000	0	0%	0%	26%	98%	0%	66%	25%
Penyusunan perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			4,052,400.00	1,280,000.00	-	-			1,360,000.00	1,235,000.00	-	0%	0%	34%	96%	0%	41%	26%
Pengamanan Barang Milik Daerah									-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang milik Daerah			2,132,400.00	1,360,000.00	-	-			1,700,000.00	1,320,000.00	-	0%	0%	80%	97%	0%	23%	35%
Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD			5,511,000.00	3,320,000.00	5,960,000.00	5,960,000.00			-	3,315,000.00	-	0%	0%	0%	100%	0%	125%	20%
Pengadaan ,Pemeliharaan Barang Milik Daerah Menunjang Urusan Pemerintahan	287,120,000.00	58,644,000.00	101,186,000.00	45,074,750.00	55,320,000.00	55,320,000.00	278,555,150.00	33,791,000.00	92,275,900.00	150,688,808.00	500,000.00	97%	58%	91%	334%	1%	21.7%	116%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jabatan										0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Pengadaan Mebel	70,000,000.00		1,957,000.00	1,160,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	69,000,000.00		4,853,400.00	-	-	99%	0%	248%	0%	0%	20%	69%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		23,841,000.00	2,299,000.00	574,750.00	1,200,000.00	1,200,000.00			2,299,000.00	-	-	0%	0%	100%	0%	0%	253%	20%

Uraian Sesuai Kewenangan Daerah	Angggaran Pada Tahun Ke-							Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-						Rata-Rata Pertumbuhan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	21
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37,120,000.00	22,000,000.00	33,250,000.00	31,720,000.00	41,470,000.00	41,470,000.00	30,103,500.00	21,000,000.00	30,295,500.00	39,936,100.00	200,000.00	81%	95%	91%	126%	0%	34%	79%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		500,000.00	12,680,000.00	1,420,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00		500,000.00	9,150,000.00	1,420,000.00	300,000.00	0%	100%	72%	100%	21%	31%	59%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	180,000,000.00	12,303,000.00	51,000,000.00	10,200,000.00	10,200,000.00	10,200,000.00	179,451,650.00	12,291,000.00	45,678,000.00	109,332,708.00	-	100%	100%	90%	1072%	0%	16%	272%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		40,640,000.00	113,160,000.00	285,221,600.00	121,720,000.00	121,720,000.00		166,765,000.00	113,765,000.00	379,911,000.00	29,900,000.00	0%	410%	101%	133%	25%	20%	134%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	16,800,000.00	7,330,000.00	18,400,000.00	5,490,000.00	5,490,000.00	-	16,800,000.00	6,990,000.00	10,220,000.00	-	0%	100%	95%	56%	0%	31%	50%
Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			2,040,000.00	8,500,000.00	-	-			1,700,000.00	3,570,000.00	-	0%	0%	83%	42%	0%	40%	25%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		16,800,000.00	5,290,000.00	9,900,000.00	5,490,000.00	5,490,000.00		16,800,000.00	5,290,000.00	6,650,000.00	-	0%	100%	100%	67%	0%	30%	53%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	-	7,040,000.00	12,840,000.00	12,530,000.00	-	-	-	16,800,000.00	9,590,000.00	28,460,000.00	-	0%	239%	75%	227%	0%	12%	108%
Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan		7,040,000.00						16,800,000.00	-	-	-	0%	239%	0%	0%	0%	8%	48%

Uraian Sesuai Kewenangan Daerah	Angggaran Pada Tahun Ke-							Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-						Rata-Rata Pertumbuhan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	21
fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan			4,640,000.00	7,210,000.00					4,640,000.00	6,700,000.00	-	0%	0%	100 %	93%	0%	21%	39%
Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan			8,200,000.00	5,320,000.00					4,950,000.00	21,760,000.00	-	0%	0%	60%	409%	0%	10%	94%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	36,820,000.00	32,400,000.00	16,230,000.00	16,230,000.00	-	16,820,000.00	21,650,000.00	31,550,000.00	-	0%	0%	59%	97%	0%	29%	31%
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			36,820,000.00	32,400,000.00	16,230,000.00	16,230,000.00		16,820,000.00	21,650,000.00	31,550,000.00	-	0%	0%	59%	97%	0%	29%	31%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	16,800,000.00	57,170,000.00	221,891,600.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	116,345,000.00	75,535,000.00	309,681,000.00	29,900,000.00	0%	693 %	132 %	140%	30%	19%	199%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		16,800,000.00	57,170,000.00	221,891,600.00	100,000,000.00	100,000,000.00		116,345,000.00	75,535,000.00	309,681,000.00	29,900,000.00	0%	693 %	132 %	140%	30%	19%	199%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	170,442,000.00	16,800,000.00	102,513,000.00	111,488,000.00	56,320,000.00	56,320,000.00	167,253,000.00	41,400,000.00	77,945,000.00	59,890,000.00	3,060,000.00	98%	246 %	76%	54%	5%	29%	96%
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	32,512,000.00						31,003,000.00		-	-	-	95%	0%	0%	0%	0%	21%	19%
Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Simswakarsa Daerah	137,930,000.00						136,250,000.00		-	-	-	99%	0%	0%	0%	0%	20%	20%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	47,545,000.00	105,538,000.00	54,120,000.00	54,120,000.00	-	24,600,000.00	42,640,000.00	53,940,000.00	3,060,000.00	0%	0%	90%	51%	6%	42%	29%

Uraian Sesuai Kewenangan Daerah	Angggaran Pada Tahun Ke-							Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-						Rata-Rata Pertumbuhan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	21
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		-	47,545,000.00	91,286,000.00	54,120,000.00	54,120,000.00		24,600,000.00	39,940,000.00	43,920,000.00	3,060,000.00	0%	0%	84%	48%	6%	44%	28%
Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat				14,252,000.00					2,700,000.00	10,020,000.00	-	0%	0%	0%	70%	0%	22%	14%
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	16,800,000.00	44,168,000.00	5,950,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	-	16,800,000.00	35,305,000.00	5,950,000.00	-	0%	100 %	80%	100%	0%	25%	56%
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		16,800,000.00	44,168,000.00	5,950,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00		16,800,000.00	35,305,000.00	5,950,000.00	-	0%	100 %	80%	100%	0%	25%	56%
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PEANGGULANGAN BENCANA ALAM	10,000,000.00						9,989,000.00			-	-	100 %	0%	0%	0%	0%	20%	20%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman Bencana Alam	10,000,000.00						9,989,000.00			-	-	100 %	0%	0%	0%	0%	20%	20%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		60,190,000.00	75,416,000.00	78,395,900.00	43,326,000.00	43,326,000.00	108,335,600.00	61,345,000.00	39,649,000.00	60,006,000.00	6,930,000.00	0%	102 %	53%	77%	16%	22%	49%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	192,634,000.00	60,190,000.00	71,776,800.00	51,395,900.00	43,326,000.00	43,326,000.00	108,335,600.00	61,345,000.00	39,649,000.00	60,006,000.00	6,930,000.00	56%	102 %	55%	117%	16%	33%	69%
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	17,971,000.00	16,800,000.00	17,699,300.00	15,876,000.00	15,876,000.00	15,876,000.00	16,809,800.00	14,100,000.00	6,534,000.00	15,856,000.00	-	94%	84%	37%	100%	0%	38%	63%
Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai Luhur Budaya Bangsa	78,346,000.00						37,358,000.00			-	-	48%	0%	0%	0%	0%	42%	10%

Uraian Sesuai Kewenangan Daerah	Angggaran Pada Tahun Ke-							Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-						Rata-Rata Pertumbuhan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	21
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	96,317,000.00						54,167,800.00			-	-	56%	0%	0%	0%	0%	36%	11%
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		19,550,000.00						19,550,000.00		-	-	0%	100%	0%	0%	0%	20%	20%
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan guna mewujudkan stabilitas Keamanan lokal , Regional dan Nasional		7,040,000.00	15,867,500.00	3,039,900.00				27,695,000.00	8,915,000.00	20,950,000.00	-	0%	393%	56%	689%	0%	9%	228%
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		16,800,000.00			9,450,000.00	9,450,000.00			-	-	3,930,000.00	0%	0%	0%	0%	42%	182%	8%
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									2,600,000.00			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		-	38,210,000.00	32,480,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00			21,600,000.00	23,200,000.00	3,000,000.00	0%	0%	57%	71%	17%	45%	29%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		52,867,500.00	123,858,200.00	110,097,200.00	44,895,000.00	44,895,000.00		47,887,500.00	74,530,000.00	120,606,000.00	6,570,000.00	0%	91%	60%	110%	15%	30%	55%
Koordinasi Kegiatan Pembedayaan Desa	-	52,867,500.00	55,748,000.00	66,236,000.00	5,685,000.00	5,685,000.00	-	-	46,100,000.00	86,728,000.00	-	0%	0%	83%	131%	0%	28%	43%
Peningkatan Partisifasi Masyarakat yang berpartisifasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			4,300,000.00						1,360,000.00	-	-	0%	0%	32%	0%	0%	63%	6%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		52,867,500.00	51,448,000.00	66,236,000.00	5,685,000.00	5,685,000.00			44,740,000.00	86,728,000.00	-	0%	0%	87%	131%	0%	28%	44%

Uraian Sesuai Kewenangan Daerah	Angggaran Pada Tahun Ke-							Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-						Rata-Rata Pertumbuhan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	21
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	64,010,200.00	43,961,200.00	8,910,000.00	8,910,000.00	-	47,887,500.00	28,430,000.00	33,878,000.00	-	0%	0%	44%	77%	0%	23%	24%
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								27,720,000.00				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Peningkatan Kafasitas Lembaga Kemasyarakatan			33,459,000.00	11,548,000.00				20,167,500.00	15,297,500.00	9,208,000.00	-	0%	0%	46%	80%	0%	20%	25%
Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			10,033,700.00						-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyyarakat			17,417,500.00	24,063,200.00	4,950,000.00	4,950,000.00			13,132,500.00	16,320,000.00	-	0%	0%	75%	68%	0%	35%	29%
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			3,100,000.00	8,350,000.00	3,960,000.00	3,960,000.00				8,350,000.00	-	0%	0%	0%	100%	0%	46%	20%
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	-	30,300,000.00	30,300,000.00	-	-	-	-	6,570,000.00	0%	0%	0%	0%	22%	184%	4%
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara					5,050,000.00	5,050,000.00				-	5,040,000.00	0%	0%	0%	0%	100%	40%	20%
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga					5,050,000.00	5,050,000.00				-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					5,050,000.00	5,050,000.00				0	1,530,000.00	0%	0%	0%	0%	30%	132%	6%

Uraian Sesuai Kewenangan Daerah	Angggaran Pada Tahun Ke-							Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-						Rata-Rata Pertumbuhan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	21
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat					5,050,000.00	5,050,000.00				0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya					5,050,000.00	5,050,000.00				0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga					5,050,000.00	5,050,000.00				0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	42,703,000.00	79,502,500.00	119,093,000.00	87,093,000.00	37,439,000.00	37,439,000.00		39,874,700.00	59,479,000.00	62,800,000.00	37,765,000.00	0%	50%	50%	72%	101%	40%	55%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	38,562,500.00	113,863,000.00	87,093,000.00	36,439,000.00	32,789,000.00	-	39,874,700.00	59,479,000.00	62,800,000.00	37,765,000.00	0%	103%	52%	72%	104%	31%	66%
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		9,975,000.00	19,860,000.00	26,750,000.00	5,650,000.00	5,650,000.00		14,109,700.00	11,360,000.00	8,500,000.00	2,550,000.00	0%	141%	57%	32%	45%	37%	55%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			28,550,000.00	23,500,000.00	6,650,000.00	6,650,000.00			12,780,000.00	29,070,000.00	-	0%	0%	45%	124%	0%	31%	34%
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			14,345,000.00		3,650,000.00				4,225,000.00	-	-	0%	0%	29%	0%		85%	6%
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		26,127,500.00	40,648,000.00	36,843,000.00	20,489,000.00	20,489,000.00		25,765,000.00	28,159,000.00	25,230,000.00	35,215,000.00	0%	99%	69%	68%	172%	25%	82%
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		2,460,000.00							-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga			5,230,000.00						-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Uraian Sesuai Kewenangan Daerah	Angggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-						Rata-Rata Pertumbuhan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	21
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa									2,955,000.00			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			5,230,000.00						-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA	42,703,000.00						40,290,500.00			-	-	94%	0%	0%	0%	0%	21%	19%
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Managemen Pemerintahan Desa	17,600,000.00						17,177,500.00			-	-	98%	0%	0%	0%	0%	20%	20%
Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan	5,103,000.00						23,113,000.00			-	-	453%	0%	0%	0%	0%	4%	91%
										-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
											-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
JUMLAH	1,984,162,563	4,120,645,000	5,175,262,969	5,460,406,492	4,553,989,312	4,992,364,592	2,044,182,663	4,666,994,958	3,733,532,599	5,426,050,096	1,171,415,864	103%	113%	72%	99%	26%	31%	83%

Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Rancabali , 2025

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Rancabali

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang tepat sasaran dan berkualitas, Kecamatan Rancabali sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat wilayah memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan tersedianya berbagai layanan dasar secara cepat, mudah, akuntabel, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Secara umum, kelompok sasaran layanan Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung dikategorikan sebagai berikut:

a. Warga Masyarakat Umum

Kelompok ini merupakan penerima utama layanan administrasi dasar, seperti penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, serta layanan informasi, konsultasi, dan pengaduan publik.

c. Kelompok Rentan

Kelompok ini mencakup lansia, penyandang disabilitas, keluarga miskin, dan korban bencana. Mereka menjadi sasaran prioritas dalam program bantuan sosial, akses layanan publik yang inklusif, masyarakat.

c. Pemerintah Desa

Sasaran layanan ini berkaitan dengan dukungan teknis dan administratif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pemberian rekomendasi dalam rangka pencairan keuangan desa, pembinaan kelembagaan, serta fasilitasi koordinasi program pembangunan desa agar selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.

2.1.5. Mitra Kecamatan Rancabali dalam Pemberian Pelayanan

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Kecamatan Rancabali tidak dapat bekerja secara sendiri, melainkan membutuhkan dukungan serta sinergi dengan berbagai pihak sebagai mitra kerja. Kecamatan Rancabali berperan sebagai koordinator, fasilitator, dan penghubung antara masyarakat dengan Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung yang memiliki kewenangan teknis. Kehadiran mitra ini menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan pelayanan, memperkuat efektivitas program, serta memastikan bahwa layanan yang diberikan benar benar menjawab kebutuhan masyarakat. Mitra Kecamatan Rancabali dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Pemerintah Desa

Sebagai perpanjangan tangan kecamatan di tingkat desa, pemerintah desa menjadi mitra utama dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, pelayanan dasar, serta koordinasi pembangunan wilayah.

b. Perangkat Daerah Terkait

Kecamatan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung dalam hal pelayanan yang bersifat sektoral, seperti:

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terkait pelayanan administrasi kependudukan, seperti pembuatan KTP, KK, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya yang menjadi kebutuhan dasar Masyarakat.
- Dinas Sosial, dalam penyaluran bantuan sosial, penanganan fakir miskin, penyandang disabilitas, anak terlantar, maupun program kesejahteraan sosial lainnya.
- Dinas Kesehatan, mendukung pelayanan kesehatan masyarakat melalui puskesmas dan posyandu.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mitra utama dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk penguatan kapasitas aparatur desa dan pengelolaan dana desa.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dalam penanganan bencana alam maupun non-alam, kesiapsiagaan, serta mitigasi risiko bencana di wilayah kecamatan.
- Satuan Polisi Pamong Praja, dalam penegakan perda, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, sebagai mitra dalam perencanaan pembangunan, sinkronisasi program, dan penyelarasan arah kebijakan dengan RPJMD Kabupaten Bandung.
- Dinas Lingkungan Hidup, terkait pengelolaan lingkungan, pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, serta pelestarian lingkungan hidup.
- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terkait program kependudukan, keluarga pembangunan keluarga (Bangga Kencana).

d. Instansi Vertikal

Instansi vertikal adalah perangkat pemerintahan pusat yang ada di daerah, yang struktur organisasinya langsung berada di bawah kementerian/lembaga, bukan di bawah pemerintah daerah. Meski begitu, dalam praktik pelayanan publik, instansi vertikal sering menjadi mitra penting kecamatan seperti:

- Kepolisian Sektor (Polsek), mitra dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
- Komando Rayon Militer, mitra dalam bidang pertahanan dan ketahanan wilayah.
- Kantor Urusan Agama, mitra dalam pelayanan urusan keagamaan, khususnya pencatatan pernikahan, pembinaan kehidupan beragama, zakat, dan wakaf.
- Kantor Pertanahan/BPN, mitra dalam urusan pertanahan, seperti sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan program pendaftaran tanah sistematis.

Dengan adanya kolaborasi bersama mitra-mitra tersebut, pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Rancabali dapat berlangsung lebih terpadu, efektif dan efisien sehingga mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Rancabali

1.2.1. Penelaahan RPJMN 2025-2029

Visi Presiden periode 2025–2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. RPJMN Tahun 2025–2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, wilayah Pulau Jawa masih menghadapi berbagai tantangan

yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pusat ekonomi nasional, Pulau Jawa memiliki beban yang kompleks, mulai dari inefisiensi perkotaan, rendahnya adopsi teknologi dalam industri, hingga ketimpangan infrastruktur dan kerentanan terhadap bencana. Selain itu, permasalahan sosial seperti *mismatch* keterampilan dengan kebutuhan industri, tingginya angka kemiskinan, serta persoalan kesehatan masyarakat seperti stunting dan TBC juga menjadi isu yang harus segera ditangani. Untuk itu, identifikasi isu prioritas dan strategis menjadi langkah penting dalam perumusan kebijakan yang efektif guna memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Isu-isu strategis yang dihadapi Pulau Jawa dalam RPJMN 2025–2029 tidak terlepas dari kondisi yang terjadi di wilayah- wilayah tertentu, termasuk Kabupaten Bandung. Sebagai bagian dari wilayah Bandung Raya, Kabupaten Bandung menghadapi tantangan serupa dengan skala yang lebih spesifik sesuai karakteristik wilayahnya. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi Pulau Jawa, seperti inefisiensi perkotaan, rendahnya adopsi teknologi industri, kesenjangan infrastruktur, serta ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan, juga ditemukan di Kabupaten Bandung, meskipun dengan akar masalah yang lebih kontekstual. Dalam konteks Kabupaten Bandung, tantangan pembangunan utama terkait dengan:

a. Belum optimalnya hilirisasi dan diversifikasi industri berbasis
b. sumber daya alam
c. Pengembangan pusat pertumbuhan yang belum efisien Rendahnya produktivitas masyarakat akibat keterbatasan konektivitas, akses pendidikan, dan layanan kesehatan.

Kecamatan Rancabali sebagai bagian dari Kabupaten Bandung turut merasakan tantangan pembangunan yang memengaruhi kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. Salah satu isu krusial yang dihadapi adalah rendahnya produktivitas masyarakat akibat keterbatasan konektivitas, akses pendidikan, dan layanan Kesehatan. Keterbatasan konektivitas menyebabkan mobilitas penduduk antar wilayah menjadi kurang optimal, menghambat distribusi ekonomi lokal, serta memperlebar kesenjangan antara desa-desa di Kecamatan Rancabali dengan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah lainnya.

Akses pendidikan juga menjadi tantangan serius, terutama pada jenjang menengah atas. Menengah Atas (SMA) Negeri di wilayah

Kecamatan Rancabali . Selain itu, layanan kesehatan yang belum merata dan fasilitas yang terbatas memperparah tantangan sosial di masyarakat. Kondisi ini secara keseluruhan berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya daya saing lokal, dan terhambatnya percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kecamatan Rancabali .

1.2.2. Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang akan menjadi pedoman bagi pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kerja Bupati Bandung terpilih, serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan pembangunan daerah. Perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan tahapan yang penting karena berpengaruh langsung terhadap visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan pada tahapan selanjutnya. Untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan pembangunan daerah. Berdasarkan kondisi kabupaten bandung beberapa tahun terakhir, maka permasalahan pembangunan utama di Kabupaten Bandung yang berkaitan dengan misi 3 “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel” yaitu: 1. Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan

Tabel 2.12 Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan

Urutan Prioritas	Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintah
1	Reformasi birokrasi yang masih butuh peningkatan dalam rangka menghadapi *dynamic government*
2	Implementasi SPBE yang belum sepenuhnya stabil, dengan masih adanya tantangan dalam integrasi sistem digital pemerintahan

Urutan Prioritas	Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintah
3	Kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan, baik dari segi transparansi, akuntabilitas, maupun partisipasi masyarakat

Sumber : Analisa Bapperinda, 2025

Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Kabupaten Bandung masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Salah satu tantangan utama adalah kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Selain itu, reformasi birokrasi juga menjadi perhatian karena masih diperlukan peningkatan dalam menghadapi perubahan dinamika pemerintahan yang semakin kompleks di era digital. Salah satu langkah penting untuk mengatasi tantangan ini adalah mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang masih menghadapi kendala dalam integrasi sistem digital. Dengan meningkatkan stabilitas dan koordinasi dalam sistem digital pemerintahan, diharapkan pelayanan publik dapat lebih mudah diakses, responsif, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat dan transparan.

1.2.3. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan perangkat daerah.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044. Telaahan rencana tata

ruang wilayah ditunjukan untuk mengidentifikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan Kecamatan Rancabali sehingga dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan proritas wilayah pelayanan Kecamatan Rancabali dalam jangka panjang. Kecamatan Rancabali sebagai salah satu Wilayah yang termasuk dalam lingkup wilayah Kabupaten Bandung dalam menentukan Rencana Stategis sangat memperhatikan Rencana Tata Ruang Kabupaten Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah tersebut diatas. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berkaitan dengan Wilayah Kecamatan Rancabali adalah sebagai berikut :

1. Wilayah Kecamatan Rancabali Termasuk dalam Kawasan Bandung Selatan (KBS)
2. Kecamatan Rancabali termasuk dalam Pusat pelayanan lingkungan (PPL) yang merupakan kawasan perdesaan yang merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa;

1.2.4. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjuta telah menjadi dasar dan integrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS berperan dalam menilai dampak kebijakan sejak tahap perencanaan agar tidak merusak ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung telah melaksanakan kajian mendalam terkait isu-isu strategis yang akan menjadi fondasi bagi penyusunan strategi pembangunan berkelanjutan yang lebih terfokus dan efisien. Adapun muatan KLHS RPJMD tahun 2025- 2029 Kabupaten Bandung menitikberatkan pada 9 isu strategis pembangunan berkelanjutan, dari 9 isu strategis tersebut yang beririsan dengan wewenang Kecamatan yaitu:

Tabel 2. 15 Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Bandung

No	Isu PB Prioritas Berdasarkan Indikator	TPB yang mendukung Isu PB
1	Rendahnya kualitas SDM (sumber daya manusia) mengakibatkan rendahnya kualitas hidup Masyarakat	TPB 4
2	Belum optimalnya tata kelola pemerintah akibat kurangnya keselarasan program antar OPD	TPB 16
3	Belum optimalnya penanganan tanggap darurat bencana	TPB 1

Sumber: KLHS RPJMD, 2025

Sebagai wilayah administratif yang terus berkembang,Kecamatan Rancabali memiliki peran strategis dalam mendukung penyelesaian berbagai isu pembangunan secara berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, Kecamatan Rancabali berkomitmen untuk mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development Goals/SDGs)* melalui pendekatan kolaboratif bersama Pemerintah Kabupaten, pemerintah desa, serta partisipasi aktif masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan yang sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan secara terpadu.

Dengan pendekatan tersebut, pembangunan di wilayah Kecamatan Rancabali diharapkan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga mengedepankan keberlanjutan sumber daya, keadilan sosial, dan ketahanan wilayah dalam jangka panjang.

Wilayah Kecamatan Rancabali merupakan sebagian wilayah di Kabupaten Bandung dengan memiliki luas wilayah 14.800,15 Ha.

- Topografi Kecamatan Rancabali merupakan daerah dataran tinggi, perbukitan, pegunungan, termasuk daerah perkebunan dan kehutanan dengan batas wilayah sebagai berikut:

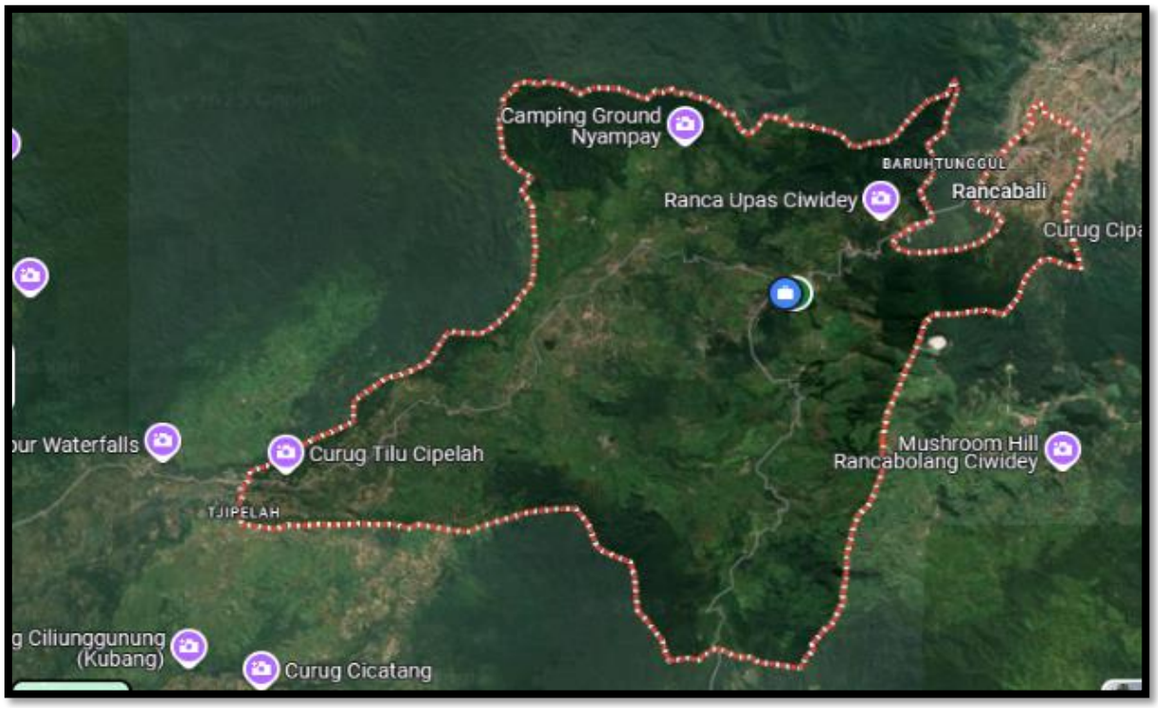
- Batas Wilayah:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Ciwidey Kab. Bandung
SebelahSelatan : Berbatasan dengan Balegede Kab. Cianjur
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Pasirjambu Kab. Bandung
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Sindangkerta, Kab. Bandung Barat
Desa/Kelurahan yang ada:

1. Desa Cipelah,

2. Desa Sukaresmi,
3. Desa Indragiri,
4. Desa Patengan, dan
5. Desa Alamendah

2.6 Gambar Peta Wilayah Kecamatan Rancabali



Sumber: Analisis Kecamatan Rancabali, 2025

Kecamatan Rancabali di Bandung memiliki ketinggian sekitar 1.681 meter di atas permukaan laut (mdpl). Secara umum, wilayah di sekitar Rancabali, termasuk perkebunan teh, terletak pada ketinggian sekitar 1.650 mdpl.

Faktor pendorong dari kebijakan RTRW dan KLHS bagi Kecamatan Rancabali yaitu:

1. Impilkasi pada kehidupan masyarakatnya di mana dengan adanya kebijakan-kebijakan RTRW dan KLHS yang berpengaruh pada aspek-aspek penting kehidupan masyarakat seperti aspek mata pencaharian, pendidikan, dan lainnya di Kecamatan Rancabalidapat difasilitasi oleh program-program yang direncanakan oleh Pemerintah Kecamatan.
2. Jumlah lapangan pekerjaan di sektor Pariwisata, Perkebunan dan Pertanian yang terbuka diharapkan semakin meningkat seiring dengan berjalannya implementasi RTRW yang diharapkan akan memancing pengusaha baik pengusaha besar ataupun menengah
3. Membuka lapangan pekerjaan di wilayah Kecamatan Rancabali.

4. Dengan adanya pertumbuhan masyarakat yang kian pesat dan pertumbuhan pembangunan daerah yang signifikan di wilayah Kecamatan Rancabali, Pemerintah Kecamatan sedikit demi sedikit dapat menyelaraskan perannya dalam pemantauan dan pengendalian peningkatan pertumbuhan pembangunan daerahnya.

Adapun faktor penghambat dari kebijakan RTRW dan KLHS bagi Kecamatan Rancabali yaitu:

1. Pengambilan kebijakan-kebijakan Pemerintah Kecamatan atas pemberlakukan pengelolaan RTRW kewilayahan yang berkesinambungan dengan KLHS Kabupaten Bandung yang membutuhkan penyelarasan dengan RTRW dan KLHS agar kebijakan yang diambil sesuai dengan perkembangan kondisi.

Pengaruh kebijakan RTRW dan KLHS sangat berpengaruh besar pada pelaksanaan di lapangan dengan topotipe Kecamatan Rancabali yang merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah ibukota Kabupaten Bandung dan salah satu kecamatanyang menopang langsung pertumbuhan wilayah di Ibu Kota Kabupaten Bandung. Sehingga kebijakan-kebijakan RTRW sangatlah penting bagi Kecamatan Rancabali dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahannya.

1.2.5. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Rancabali.

Identifikasi Permasalahan didasarkan pada 2 (dua) tugas mendasar Kecamatan Rancabali yaitu berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 tahun 2023 Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2023 dan Keputusan Bupati Bandung nomor 137.1/Kep.769-TAPEM/2023 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. Permasalahan yang diidentifikasi merupakan relasi antara kewenangan Kecamatan Rancabali terhadap permasalahan pembangunan yang terdapat pada Perubahan RPJMD 2021-2026.

Secara rinci permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Rancabali dalam menjalankan tugas dan fungsinya disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.13 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Urusan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kurangnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan Rancabali	Kurang optimalnya pemenuhan pelayanan publik dari berbagai dimensi yaitu dimensi sarana prasarana, kehandalan petugas, empati, ketanggapan, dan jaminan	1. Sarana dan Prasarana pelayanan publik yang belum memadai. 2. Kehandalan dari petugas yang harus ditingkatkan. 3. Empati yang perlu dijadikan tradisi dalam melayani. 4. Ketanggapan yang perlu dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan 5. Petugas yang perlu memberikan jaminan pelayanan terhadap tugas dan tanggung jawab mereka sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
		Belum optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	1. Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 2. Terdapat mispersepsi batasan kewenangan Camat dengan Perangkat Daerah mitra
Urusan Peningkatan Kualitas Pemerintahan Desa			
2	Belum optimalnya pencapaian kinerja pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat desa, pengelolaan keuangan dan aset Desa	Ketidaksinkronan antara perencanaan dengan pelaksanaan	1. Kurangnya pengetahuan aparatur Desa atas siklus pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset desa 2. Belum optimalnya pembinaan dari pihak Kecamatan
3	Belum optimalnya pengukuran atas keberhasilan pemerintah Desa dalam menjalankan	Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi desa dari seluruh aspek.	Evaluasi Perkembangan Desa yang merupakan instrumen dan alat ukur penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan belum dilaksanakan secara optimal.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	tugas dan fungsinya.		
Urusan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Internal (Non Urusan)			
4	Belum optimalnya pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Ketidaksinkronan antara perencanaan kinerja dan keuangan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi	1. Kurangnya sinergitas yang dibangun antara pimpinan dengan bawahan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan. 2. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman teknis atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai. 3. Kurang optimalnya pemanfaatan dan pemeliharaan barang milik daerah

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Rancabali, 2025

2.2.6. Isu Strategis

Isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan terhadap perangkat daerah di masa yang datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan, dan hasil telaahan lainnya, maka isu strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan di Kecamatan Rancabali, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintah
3. Meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap perundang-undangan daerah.
4. Meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan umum.
5. Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan desa

6. Meningkatkan kualitas masyarakat dalam berlingkungan guna menopang pelaksanaan pembangunan daerah.

Isu-isu strategis yang perlu penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang, yang akan mempengaruhi terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi kecamatan, yaitu:

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efesien dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Menerapkan pola kualitas lingkungan dengan pembinaan dan sosialisasi tentang kebijakan penerapan RTRW di Kabupaten bandung terhadap Kecamatan khususnya Kecamatan Rancabali.

Tabel 2.14 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Pelayanan publik tingkat dasar dan daerah pertanian	Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai	Rendahnya kualitas SDM (Sumber Daya Manusia)	Tranformasi Digital	Bonus demografi	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Optimalisasi kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur untuk menduku ng peningkatan kinerja pelayanan publik
	Pelaksanaan sistem	Sinkronisasi	Belum optimalny	Desentralisasi dan	Kualitas tata kelola	Peningkatan

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
	akuntabilitas kinerja kecamatan yang masih perlu ditingkatkan	program antar OPD belum baik	a tata kelola pemerintah akibat kurangnya keselarasan program antar OPD	otonomi daerah	pemerintahan	kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja kecamatan
	Kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan	Belum optimalnya tata kelola pemerintah	Transformasi Digital	Desentralisasi dan otonomi daerah	Kualitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan mutu dan konsistensi pelayanan publik yang cepat, mudah, dan akuntabel
	Pengelolaan keuangan dan administrasi desa yang belum tertib	Belum optimalnya tata kelola pemerintah	Transformasi Digita	Desentralisasi dan otonomi daerah	Kualitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan desa melalui tertib administrasi dan pelaporan
	Terdapat wilayah dengan kerawanan longsor, banjir, dan permasalahan sampah liar	Belum optimalnya penanganan tanggap darurat bencana	Perubahan Iklim	Perubahan iklim, data dukung dan daya tampung lngkungan, serta ketahanan bencana	Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Peningkatan penanganan permasalahan sampah dan pengendalian risiko bencana lingkungan di wilayah kecamatan

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Rancabali, 2025

Isu Strategis 1: Optimalisasi kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur untuk mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik Isu ini

muncul dari fakta bahwa jumlah aparatur yang terbatas, ditambah dengan kompetensi yang belum merata, menyebabkan sebagian tugas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan belum berjalan optimal. Hal ini dapat berdampak pada potensi keterlambatan layanan, rendahnya inovasi, serta terbatasnya kapasitas kecamatan dalam merespons kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Dengan demikian, isu strategis yang harus dihadapi Kecamatan Rancabali adalah bagaimana meningkatkan kapasitas, kompetensi, serta proporsi jumlah aparatur yang sesuai kebutuhan. Upaya strategis yang dapat ditempuh meliputi penguatan manajemen SDM berbasis kompetensi, mengikutsertakan aparatur dengan pelatihan yang relevan serta pengalokasian sumber daya manusia secara lebih proporsional sesuai beban kerja.

Isu Strategis 2: Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja kecamatan Isu strategis ini muncul dari masih ditemukannya catatan kekurangan dalam hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Rancabali. Kurangnya keterpaduan antar dokumen perencanaan, konsistensi, ketepatan data serta pemanfaatan hasil evaluasi yang belum optimal. Untuk itu, peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja kecamatan perlu dilakukan melalui penguatan kapasitas aparatur, pemanfaatan sistem informasi kinerja serta penerapan mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih sistematis.

Isu Strategis 3: Peningkatan mutu dan konsistensi pelayanan publik yang cepat, mudah, dan akuntabel Kecamatan sebagai unit terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan layanan yang responsif, transparan, dan berkualitas. Namun masih terdapat permasalahan/kekurangan dari beberapa unsur pelayanan seperti waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat, belum optimalnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), keterbatasan dukungan sarana prasarana serta belum optimalnya penerapan sistem digital yang dapat menjamin kecepatan dan kemudahan layanan. Untuk itu, peningkatan mutu dan konsistensi pelayanan publik menjadi isu strategis yang harus dihadapi. Upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah penyederhanaan prosedur layanan, peningkatan kapasitas aparatur serta pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat proses administrasi. Upaya ini diharapkan mampu mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, mudah diakses, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kecamatan Rancabali.

Isu Strategis 4: Peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan desa melalui tertib administrasi dan pelaporan Pengelolaan keuangan desa yang tertib menjadi fondasi penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Permasalahan yang sering muncul adalah lemahnya pencatatan administrasi, keterlambatan laporan pertanggungjawaban, serta kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap regulasi keuangan. Hal ini mengakibatkan potensi ketidakefisienan dalam pemanfaatan anggaran dan menimbulkan kerentanan terhadap kesalahan administrasi. Oleh karena itu, strategi peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan desa perlu difokuskan pada penguatan kapasitas aparatur desa, pendampingan teknis, penerapan sistem administrasi dan pelaporan yang lebih tertib serta penguatan mekanisme pengawasan dan pendampingan.

Isu Strategis 5: Peningkatan penanganan permasalahan sampah dan pengendalian risiko bencana lingkungan di wilayah kecamatan Permasalahan sampah liar serta risiko bencana lingkungan seperti longsor masih menjadi tantangan bagi Kecamatan Rancabali. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat serta keberlangsungan aktivitas sosial dan ekonomi. Sebagai langkah strategis, diperlukan peningkatan efektivitas pengelolaan sampah melalui kolaborasi pemerintah, desa, dan masyarakat, serta penerapan pola hidup bersih dan ramah lingkungan. Selain itu, pengendalian risiko bencana perlu diperkuat dengan upaya mitigasi, pemetaan wilayah rawan serta pelibatan aktif masyarakat dalam penanggulangan bencana. kegiatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Rancabali merupakan arah yang hendak dicapai dalam periode perencanaan lima tahunan, yang disusun secara selaras dengan visi dan misi Bupati Bandung sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029. Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Rancabali didasarkan pada analisis kondisi wilayah, potensi yang dimiliki, permasalahan aktual yang dihadapi, serta hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya. Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Rancabali yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

3.1.1. Tujuan

Dalam kerangka pelaksanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien, penetapan tujuan perangkat daerah menjadi instrumen penting dalam mengarahkan perumusan sasaran dan program pembangunan yang terukur. Penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 ditentukan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati, yang mencerminkan arah pembangunan atau kondisi ideal yang ingin dicapai selama masa jabatan lima tahun pada periode 2025-2029. Visi menjadi landasan dalam merumuskan prioritas pembangunan daerah yang sejalan dengan misi yang diemban. Saat ini Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung periode tahun 2025-2029 memilki visi yang ingin dicapai selama masa jabatan lima tahun yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”. Berikut penjabaran makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Lebih Bedas: Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bedas memiliki arti yaitu untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur dan

senantiasa dilestarikan sebagai dasar-dasar kehidupan bermasyarakat warga Kabupaten Bandung dalam membangun peradaban yang terus lebih baik dari masa ke masa. 2. Maju: Terwujudnya Kabupaten Bandung Maju memiliki arti yaitu Kabupaten Bandung dalam 5 (lima) tahun kepemimpinan akan mencapai kondisi terbaik perkembangan masyarakat yang ditunjukkan oleh tingginya angka indikator-indikator tertentu yang berlaku, tercapainya standar minimal yang ditetapkan secara nasional, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga melampaui rata-rata provinsi dan nasional. 3. Berkelanjutan: Terwujudnya Kabupaten Bandung Berkelanjutan memiliki arti yaitu pembangunan yang optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung mempertimbangkan segala akan aspek diupayakan secara dengan bijaksana. Pembangunan yang diselenggarakan tidak akan pernah mengorbankan alam sehingga manfaatnya dapat terus dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Bandung.

Berdasarkan visi pembangunan yang ada, dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025- 2029 dengan mengacu rumusan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang diselaraskan dengan misi RPJPD. Misi pembangunan berikut akan menjadi acuan dalam pembuatan program serta kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Berikut misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

- Misi 1 :Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Keseteraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak
- Misi 2 :Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan .
- Misi 3 :Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel .
- Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi.
- Misi 5 :Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum Misi pembangunan di atas selanjutnya dijadikan rujukan dalam menyusun kerangka berpikir logis (*Logical Framework*) pencapaian misi dalam bentuk cascading tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029.

Tata kelola pemerintahan adalah salah satu aspek mendasar dalam manajerial Sebuah pemerintahan yang baik yang harus memegang prinsip *good governance* yaitu partisipasi masyarakat, tegaknya hukum, transparansi, supremasi melibatkan stakeholder dunia usaha, konsensus, akuntabilitas, kesetaraan, efisiensi dan efektivitas. Dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik pada tingkat Kecamatan tidak terlepas dari pelaksanaan tugas dan kewenangan camat/Kecamatan dikarenakan hal tersebut merupakan tugas yang melekat pada camat yang diatur dengan perundangan-undangan dan selain itu kewenangan yang diberikan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan merupakan kewenangan yang bersipat mandataris yang wajib dilaksanakan meskipun dalam kewenangan tersebut tidak seluruhnya dapat dilaksanakan dikarenakan potensi yang tidak ada maupun tuntutan kebutuhannya yang tidak pasti kuantitasnya dalam ukuran tahunan.

Kecamatan Rancabali sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, memiliki peran penting dalam mendekatkan layanan pemerintahan kepada masyarakat, terutama dalam memberikan pelayanan administrasi yang cepat, mudah, dan akuntabel. Selama periode perencanaan lima tahunan 2025–2029, Kecamatan Rancabali menetapkan tujuan strategis yaitu: “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”. Tujuan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan peran Kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten di tingkat wilayah yang menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan layanan dasar bagi masyarakat. Pelayanan publik yang dimaksud tidak hanya menyangkut layanan administrasi kependudukan, tetapi juga mencakup fasilitasi program pembangunan, pengaduan masyarakat, koordinasi antar lembaga, serta pembinaan kepada pemerintah desa. Tujuan ini juga sejalan dengan misi ketiga Kabupaten Bandung, yaitu “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel”.

Dengan mengacu pada misi tersebut, Kecamatan Rancabali diarahkan untuk memperkuat kapasitas sumber daya aparatur, memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan, serta membangun sistem kerja yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, tujuan tersebut tidak hanya menjadi target internal Kecamatan, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan.

3.1.2. Sasaran

Sasaran Pembangunan Kecamatan Rancabali Tahun 2025–2029 difokuskan pada peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan. Sebagai implementasi dari tujuan strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”, Kecamatan Rancabali menetapkan sasaran “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan” sebagai fokus pembangunan jangka menengah tahun 2025–2029. Sasaran ini menjadi landasan utama dalam mendorong transformasi layanan publik yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani. Secara rinci tujuan dan sasaran Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung termuat dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Rancabali Pemerintah Kabupaten Bandung

NPSK Dan Sasaran RPJMDd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.28.0000 - KECAMATAN RANCABALI											
- Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik		Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	0	0,19	0.22	0.24	0.25	0.26	0.27	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (poin)	93,7	93.88	94.08	94.31	94.55	94.79	95.05	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai PermenPANR) Nomor 14 Tahun 2017

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Rancabali, 2025

3.2. Strategi Kecamatan Rancabali dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Rancabali Tahun 2025-2029

Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan, dalam pengembangannya konsep mengenai strategi harus terus memiliki perkembangan dan setiap orang mempunyai pendapat atau definisi yang berbeda mengenai strategi. Strategi dalam suatu pemerintahan sangatlah dibutuhkan untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah, maupun untuk pencapaian sasaran atau tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka menengah. 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Arah kebijakan adalah

rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan visi dan misi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Rancabali

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan SDM aparatur kecamatan, sarana dan prasarana serta mekanisme pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat	Peningkatan SDM aparatur kecamatan, sarana dan prasarana pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat serta membangun pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat melalui peningkatan pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat melalui penerapan pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat yang berkelanjutan
Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/keluraha n melalui pemetaan permasalahan dan potensi lokal	Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/keluraha n dengan mendorong inovasi berdasarkan hasil pemetaan permasalahan dan potensi lokal	Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/keluraha n berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor	Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/keluraha n berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor	Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/keluraha n berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Rancabali, 2025

Berikut adalah penjelasan mengenai penahapan tersebut:

TAHAP I: (2026) Pada tahun pertama, fokus utama adalah meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) aparatur kecamatan. Ini dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta pembenahan sarana dan prasarana publik. Diharapkan, ini dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan memberikan dasar yang kokoh untuk langkah selanjutnya.

TAHAP II: (2027) Memasuki tahun kedua, kegiatan akan beralih ke peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan memperhatikan umpan balik dari masyarakat, kecamatan akan melakukan evaluasi dan perbaikan sistem pelayanan yang ada. Selain itu, akan dilaksanakan program-program yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

TAHAP III : (2028) Di tahun ketiga, fokus akan beralih ke pengembangan dan optimalisasi pelayanan berbasis digital. Kegiatan ini akan mencakup penerapan teknologi informasi untuk mempermudah akses layanan bagi masyarakat. Melalui platform digital, diharapkan masyarakat dapat merasakan kemudahan dan kecepatan dalam berinteraksi dengan aparatur kecamatan.

TAHAP IV : (2029) Pada tahun keempat, Kecamatan Rancabali akan mendorong kolaborasi yang lebih erat dengan sektor swasta. Ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi sumber daya yang ada dan menciptakan inovasi dalam pelayanan. Kerjasama ini diharapkan dapat menghasilkan program-program yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

TAHAP V: (2030) Tahap terakhir pada tahun 2030 akan berfokus pada evaluasi dari seluruh program yang telah dilaksanakan selama lima tahun. Hasil evaluasi ini akan digunakan untuk merumuskan langkah-langkah pengembangan berkelanjutan. Dengan demikian, Kecamatan Rancabali dapat terus beradaptasi terhadap perubahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkesinambungan. Dengan penahapan yang terstruktur dan bertahap ini, diharapkan Kecamatan Rancabali mampu mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengacu pada motto “RANCABALI ASRI”, diharapkan seluruh pegawai Kecamatan Rancabali dapat memberikan pelayanan yang prima dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan.

3.3. Arah Kebijakan Kecamatan Rancabali dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Rancabali Tahun 2025-2029

Kebijakan adalah Langkah yang diambil oleh perangkat Daerah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Arah kebijakan Kecamatan Rancabali dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan yang

transparan dan akuntabel, serta pemberdayaan pemerintahan desa. Setiap kebijakan disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, hasil evaluasi program sebelumnya, dan penyesuaian terhadap dinamika pembangunan daerah. Kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kompetensi aparatur, mendorong inovasi pelayanan dengan berbasis teknologi, dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta pemangku kepentingan lokal. Selain itu, setiap tahapan kebijakan dievaluasi secara berkala guna memastikan efektivitas dan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Seluruh kebijakan diharapkan mampu menciptakan pelayanan prima serta pembangunan daerah yang berkelanjutan, adaptif, dan inklusif. Berikut ini disajikan tabel Teknik merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD :

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
	Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan berbasis potensi lokal berbasis potensi lokal	Peningkatan pelayanan publik yang responsif, adaptif, transparan, akuntabel dan berbasis digital berorientasi pada kepuasan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan	

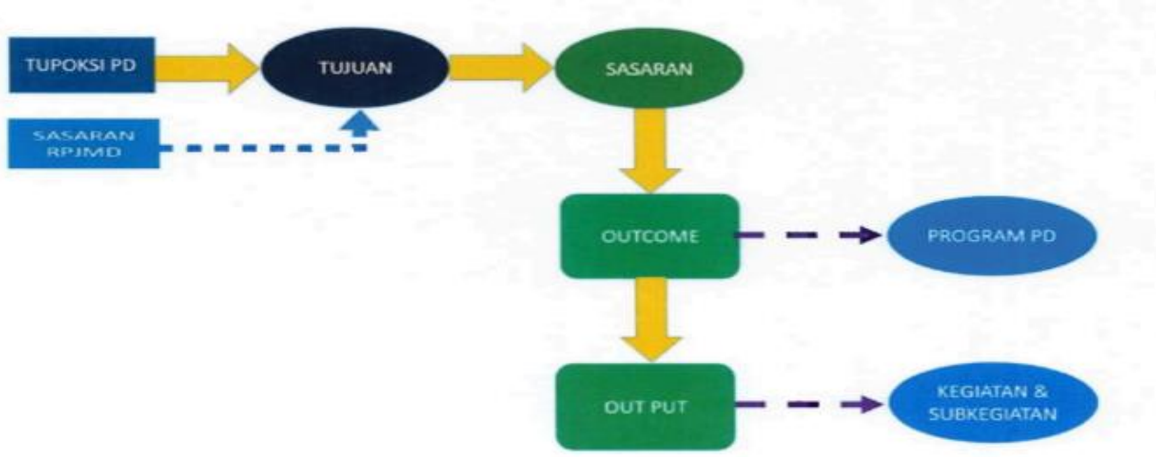
Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Rancabali,2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah Tahun 2025–2029 merupakan bagian krusial dari proses perencanaan pembangunan daerah. Kerangka ini disusun secara sistematis, berbasis data dan kebutuhan, serta mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan daerah, khususnya yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Tujuan utama dari perumusan program dan kegiatan adalah untuk menjabarkan secara operasional tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah agar dapat diwujudkan secara bertahap, terukur, dan berdampak nyata. Perencanaan tersebut harus mencerminkan keterkaitan logis antara *input* (sumber daya), *output* (luaran), *outcome* (hasil), hingga *impact* (dampak).

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Rancabali, 2025

Dalam rangka mewujudkan dari beberapa strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka Kecamatan Rancabali dalam melakukan langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai arah pencapaian tujuan dan sasaran, sedangkan Indikator kinerja adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan, target, atau hasil yang ingin dicapai dalam suatu organisasi, proyek, atau kegiatan berhasil

diwujudkan. Indikator ini membantu dalam mengukur efektivitas, efisiensi.

Adapun Teknis perumusan Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra Kecamatan Rancabali sebagai berikut:

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan
Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Rancabali
Pemerintah Kabupaten Bandung

NPSK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
7.01.0.00.0.00.28.0000 - Kecamatan Rancabali							
- Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik				Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai PermenPAN R) Nomor 14 Tahun 2017
			Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Penilaian Aplikasi Surabi oleh Bagian Organisasi dan Laporan
					Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Penilaian Manajemen Risiko oleh Inspektorat
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP oleh Inspektorat
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

NPSK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

NPSK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
				Tersedianya Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi keuangan yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang harus disusun x 100%
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

NPSK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi BMD yang telah disusun sesuai ketentuan /Jumlah Dokumen Administrasi BMD yang harus disusun x 100%
				Tersedianya Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
				Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
				Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Tersedianya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
				Tersedianya Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
				Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

NPSK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Tersedianya Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
				Tersedianya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang harus disusun x 100%
				Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
				Tersedianya Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
				Tersedianya Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
				Tersedianya Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
				Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	7.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian
				Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
				Tersedianya Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya Administrasi Umum Kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

NPSK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Tersedianya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				Tersedianya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
				Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
				Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
				Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
				Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

NPSK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Tersedianya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Tersedianya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				Tersedianya Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
				Tersedianya Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
				Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
				Tersedianya Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
				Tersedianya Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
				Tersedianya Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
				Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
				Tersedianya Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

NPSK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
				Tersedianya laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang telah disusun / Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang harus disusun x 100%
				Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
				Tersedianya Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Menunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
				Terpeliharany Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

NPSK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
				Tersedianya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
			Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah	Terselenggaranya urusan pemerintahan yang dilaksanakan : Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan x 100%	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan : Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan x 100%
				Terlaksananya koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan / koordinasi

NPSK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	di Tingkat Kecamatan	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang direncanakan x 100%
				Tersedianya Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				Tersedianya Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				Terlaksananya urusan pelimpahan kepada camat yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
				Tersedianya Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
				Tersedianya Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Terlaksananya urusan pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan	Jumlah pelaksanaan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan / jumlah kegiatan yang direncanakan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan x 100%	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan / jumlah kegiatan yang direncanakan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan x 100%
				Terlaksananya urusan pelimpahan kepada camat yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatanx100%

NPSK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Persentase Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatanx100%	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatanx100%
				Tersedianya Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
				Terpeliharanya Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta
				Tersedianya Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
				Terpeliharanya Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	7.01.02.2.03.0002 - Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta
				Terlaksananya urusan pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan
				Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
				Tersedianya Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan

NPSK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Tersedianya Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan
				Tersedianya Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan
				Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
			Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina x100%	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina x100%
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
				Tersedianya Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

NPSK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Tersedianya Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
				Tersedianya Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Terlaksananya Lembaga Kemasyarakatan Yang Terfasilitasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya
				Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan
				Tersedianya Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
				Tersedianya Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	7.01.03.2.03.0005 - Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

NPSK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

NPSK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	7.01.03.2.06.0001 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

NPSK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	7.01.03.2.06.0004 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	7.01.03.2.06.0005 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	7.01.03.2.06.0008 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

NPSK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
			Meningkatnya efektivitas koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah guna mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram dan tertib	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum x 100%	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum x 100%
				Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
				Tersedianya Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
				Tersedianya Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
				Tersedianya Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
				Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

NPSK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Tersedianya Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
			Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan	Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum x 100%	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum x 100%
				Terlaksanannya Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
				Tersedianya Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
				Tersedianya Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
				Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila
				Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

NPSK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

NPSK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Terselenggaranya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
				Tersedianya Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.01.05.2.01.0005 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
				Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	7.01.05.2.01.0006 - Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila
				Tersedianya Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	7.01.05.2.01.0007 - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
				Tersedianya Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan	Terselenggaranya Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa x100%
				Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga

NPSK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Tersedianya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
				Tersedianya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
				Tersedianya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
				Tersedianya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
				Tersedianya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
				Tersedianya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Tersedianya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif

NPSK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Tersedianya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Tersedianya Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
				Tersedianya Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
				Tersedianya Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
				Tersedianya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
				Tersedianya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
				Tersedianya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

NPSK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Tersedianya Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
				Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
				Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
				Tersedianya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
				Tersedianya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
				Tersedianya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
				Tersedianya Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	7.01.06.2.01.0004 - Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
				Tersedianya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
				Tersedianya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
				Tersedianya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

NPSK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Tersedianya Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
				Tersedianya Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
				Tersedianya Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	7.01.06.2.01.0010 - Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
				Tersedianya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.06.2.01.0011 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Tersedianya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	7.01.06.2.01.0012 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
				Tersedianya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	7.01.06.2.01.0013 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif
				Tersedianya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	7.01.06.2.01.0014 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
				Tersedianya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	7.01.06.2.01.0015 - Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
				Tersedianya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	7.01.06.2.01.0016 - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

NPSK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	7.01.06.2.01.0018 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Rancabali, 2025

Tabel 4.2 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
7.01 - KECAMATAN				5.567.959.087,00		5.202.410.000,00		5.251.886.000,00		5.276.923.250,00		5.372.238.650,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.984.649.278,00		4.799.416.000,00		4.799.416.000,00		4.799.416.000,00		4.799.416.000,00	S 3.1
Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	0	49.56	4.984.649.278,00	49.57	4.799.416.000,00	49.58	4.799.416.000,00	49.59	4.799.416.000,00	49.60	4.799.416.000,00	
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	0	61		62		63		64		65		
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				23.301.000,00		21.601.000,00		21.601.000,00		21.601.000,00		21.601.000,00	
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	23.301.000,00	1	21.601.000,00	1	21.601.000,00	1	21.601.000,00	1	21.601.000,00	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD												

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.460.000,00		5.460.000,00		5.460.000,00		5.460.000,00		5.460.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	5.460.000,00	2	5.460.000,00	2	5.460.000,00	2	5.460.000,00	2	5.460.000,00	
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				7.439.000,00		7.439.000,00		7.439.000,00		7.439.000,00		7.439.000,00	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	7.439.000,00	2	7.439.000,00	2	7.439.000,00	2	7.439.000,00	2	7.439.000,00	
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				-		-		-		-		-	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			-		-		-		-		-	
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				4.260.000,00		4.260.000,00		4.260.000,00		4.260.000,00		4.260.000,00	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	4.260.000,00	2	4.260.000,00	2	4.260.000,00	2	4.260.000,00	2	4.260.000,00	
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				-		-		-		-		-	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			-		-		-		-		-	
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.422.000,00		3.422.000,00		3.422.000,00		3.422.000,00		3.422.000,00	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	3.422.000,00	1	3.422.000,00	1	3.422.000,00	1	3.422.000,00	1	3.422.000,00	
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-		-		-		-		-	
7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1.360.000,00		510.000,00		510.000,00		510.000,00		510.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	1	1.360.000,00	1	510.000,00	1	510.000,00	1	510.000,00	1	510.000,00	
7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				1.360.000,00		510.000,00		510.000,00		510.000,00		510.000,00	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	1	1.360.000,00	1	510.000,00	1	510.000,00	1	510.000,00	1	510.000,00	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.373.018.400,00		4.373.018.400,00		4.373.018.400,00		4.373.018.400,00		4.373.018.400,00	
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	228	228	4.373.018.400,00	228	4.373.018.400,00	228	4.373.018.400,00	228	4.373.018.400,00	228	4.373.018.400,00	
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran												
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	4		4		4		4		4		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.362.170.000,00		4.362.170.000,00		4.362.170.000,00		4.362.170.000,00		4.362.170.000,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	228	228	4.362.170.000,00	228	4.362.170.000,00	228	4.362.170.000,00	228	4.362.170.000,00	228	4.362.170.000,00	
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.338.400,00		2.338.400,00		2.338.400,00		2.338.400,00		2.338.400,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	2.338.400,00	1	2.338.400,00	1	2.338.400,00	1	2.338.400,00	1	2.338.400,00	
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				8.510.000,00		8.510.000,00		8.510.000,00		8.510.000,00		8.510.000,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	4	8.510.000,00	4	8.510.000,00	4	8.510.000,00	4	8.510.000,00	4	8.510.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				-		-		-		-		-	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			-		-		-		-		-	
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				7.375.000,00		5.960.000,00		5.960.000,00		5.960.000,00		5.960.000,00	
Terlaksananya Administrasi BMD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	7.375.000,00	1	5.960.000,00	1	5.960.000,00	1	5.960.000,00	1	5.960.000,00	
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD												
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD												
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD												
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD												
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD												
7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				-		-		-		-		-	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			-		-		-		-		-	
7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			-		-		-		-		-	
7.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				-		-		-		-		-	
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			-		-		-		-		-	
7.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			-		-		-		-		-	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			-		-		-		-		-	
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				7.375.000,00		5.960.000,00		5.960.000,00		5.960.000,00		5.960.000,00	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	7.375.000,00	1	5.960.000,00	1	5.960.000,00	1	5.960.000,00	1	5.960.000,00	
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				51.986.500,00		6.810.000,00		6.810.000,00		6.810.000,00		6.810.000,00	
Tertibnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1	51.986.500,00	1	6.810.000,00	1	6.810.000,00	1	6.810.000,00	1	6.810.000,00	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	38	210		38		38		38		38		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian												
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				24.700.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1	24.700.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	
7.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian			-		-		-		-		-	
7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				5.880.000,00		2.560.000,00		2.560.000,00		2.560.000,00		2.560.000,00	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	5.880.000,00	1	2.560.000,00	1	2.560.000,00	1	2.560.000,00	1	2.560.000,00	
7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				21.406.500,00		3.250.000,00		3.250.000,00		3.250.000,00		3.250.000,00	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	38	210	21.406.500,00	38	3.250.000,00	38	3.250.000,00	38	3.250.000,00	38	3.250.000,00	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				137.418.378,00		28.502.220,00		28.502.220,00		28.502.220,00		28.502.220,00	
Terlaksananya Administrasi Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	137.418.378,00	1	28.502.220,00	1	28.502.220,00	1	28.502.220,00	1	28.502.220,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	2		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	7		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	0		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan												
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD												
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD												
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan												
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.086.800,00		1.985.400,00		1.985.400,00		1.985.400,00		1.985.400,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	4.086.800,00	1	1.985.400,00	1	1.985.400,00	1	1.985.400,00	1	1.985.400,00	
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.465.378,00		10.304.620,00		10.304.620,00		10.304.620,00		10.304.620,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	7	100.465.378,00	1	10.304.620,00	1	10.304.620,00	1	10.304.620,00	1	10.304.620,00	
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.602.200,00		477.200,00		477.200,00		477.200,00		477.200,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	2	4.602.200,00	1	477.200,00	1	477.200,00	1	477.200,00	1	477.200,00	
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				-		-		-		-		-	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			-		-		-		-		-	
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				-		206.000,00		206.000,00		206.000,00		206.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	0	-	1	206.000,00	1	206.000,00	1	206.000,00	1	206.000,00	
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				-		-		-		-		-	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			-		-		-		-		-	
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.435.000,00		2.700.000,00		2.700.000,00		2.700.000,00		2.700.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	15.435.000,00	1	2.700.000,00	1	2.700.000,00	1	2.700.000,00	1	2.700.000,00	
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.829.000,00		12.829.000,00		12.829.000,00		12.829.000,00		12.829.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	12.829.000,00	1	12.829.000,00	1	12.829.000,00	1	12.829.000,00	1	12.829.000,00	
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			-		-		-		-		-	
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			-		-		-		-		-	
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				18.065.000,00		2.200.000,00		2.200.000,00		2.200.000,00		2.200.000,00	
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	1	18.065.000,00	1	2.200.000,00	1	2.200.000,00	1	2.200.000,00	1	2.200.000,00	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan												
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	0		1		1		1		1		
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0		0		0		1		1		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	4		1		1		1		1		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		-		-		-		-	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				18.065.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	4	18.065.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	0	-	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	
7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		-		-		-	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	-	0	-	0	-	1	-	1	-	
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		-		-		-	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-		-		-		-		-	
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				303.340.000,00		308.204.380,00		308.204.380,00		308.204.380,00		308.204.380,00	
Tersedianya laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	303.340.000,00	1	308.204.380,00	1	308.204.380,00	1	308.204.380,00	1	308.204.380,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan												
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1		1		1		1		1		
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.250.000,00		1.860.000,00		1.860.000,00		1.860.000,00		1.860.000,00	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	3.250.000,00	1	1.860.000,00	1	1.860.000,00	1	1.860.000,00	1	1.860.000,00	
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				18.292.000,00		39.224.380,00		39.224.380,00		39.224.380,00		39.224.380,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	18.292.000,00	1	39.224.380,00	1	39.224.380,00	1	39.224.380,00	1	39.224.380,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		-		-		-		-	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			-		-		-		-		-	
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				281.798.000,00		267.120.000,00		267.120.000,00		267.120.000,00		267.120.000,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	281.798.000,00	1	267.120.000,00	1	267.120.000,00	1	267.120.000,00	1	267.120.000,00	
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				70.145.000,00		53.120.000,00		53.120.000,00		53.120.000,00		53.120.000,00	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Menunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	7	70.145.000,00	5	53.120.000,00	5	53.120.000,00	5	53.120.000,00	5	53.120.000,00	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya												
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	4		1		1		1		0		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi												
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		-		-		-		-	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			-		-		-		-		-	
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				57.105.000,00		41.470.000,00		41.470.000,00		41.470.000,00		41.470.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	7	57.105.000,00	5	41.470.000,00	5	41.470.000,00	5	41.470.000,00	5	41.470.000,00	
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.840.000,00		1.450.000,00		1.450.000,00		1.450.000,00		1.450.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	4	2.840.000,00	1	1.450.000,00	1	1.450.000,00	1	1.450.000,00	0	1.450.000,00	
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.200.000,00		10.200.000,00		10.200.000,00		10.200.000,00		10.200.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	10.200.000,00	1	10.200.000,00	1	10.200.000,00	1	10.200.000,00	1	10.200.000,00	
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			-		-		-		-		-	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				255.685.209,00		121.720.000,00		270.490.000,00		295.527.250,00		390.842.650,00	S 3.1
Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat	100	100	255.685.209,00	100	121.720.000,00	100	270.490.000,00	100	295.527.250,00	100	390.842.650,00	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				36.080.000,00		5.490.000,00		5.490.000,00		5.490.000,00		5.490.000,00	
Terlaksananya koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	1	36.080.000,00	1	5.490.000,00	1	5.490.000,00	1	5.490.000,00	1	5.490.000,00	
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			-		-		-		-		-	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				36.080.000,00		5.490.000,00		5.490.000,00		5.490.000,00		5.490.000,00	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	1	36.080.000,00	1	5.490.000,00	1	5.490.000,00	1	5.490.000,00	1	5.490.000,00	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				-		-		-		-		-	
Terlaksananya urusan pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan				-		-		-		-		-	
Terlaksananya urusan pelimpahan kepada camat yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			-		-		-		-		-	
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan												
7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				-		-		-		-		-	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			-		-		-		-		-	
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			-		-		-		-		-	
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-		-		-		-		-	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			-		-		-		-		-	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				25.540.000,00		16.230.000,00		16.230.000,00		16.230.000,00		16.230.000,00	
Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta			25.540.000,00		16.230.000,00		16.230.000,00		16.230.000,00		16.230.000,00	
	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1	1		1		1		1		1		
7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				25.540.000,00		16.230.000,00		16.230.000,00		16.230.000,00		16.230.000,00	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1	1	25.540.000,00	1	16.230.000,00	1	16.230.000,00	1	16.230.000,00	1	16.230.000,00	
7.01.02.2.03.0002 - Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum dengan Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta			-		-		-		-		-	
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				194.065.209,00		100.000.000,00		248.770.000,00		273.807.250,00		369.122.650,00	
Terlaksananya urusan pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan			194.065.209,00		100.000.000,00		248.770.000,00		273.807.250,00		369.122.650,00	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan												
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	1		1		1		1		1		
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan			-		-		-		-		-	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan			-		-		-		-		-	
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				194.065.209,00		100.000.000,00		248.770.000,00		273.807.250,00		369.122.650,00	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	1	194.065.209,00	1	100.000.000,00	1	248.770.000,00	1	273.807.250,00	1	369.122.650,00	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				109.940.000,00		44.895.000,00		44.895.000,00		44.895.000,00		44.895.000,00	S 3.1
Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina	100	100	109.940.000,00	100	44.895.000,00	100	44.895.000,00	100	44.895.000,00	100	44.895.000,00	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				32.600.000,00		5.685.000,00		5.685.000,00		5.685.000,00		5.685.000,00	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	1	32.600.000,00	1	5.685.000,00	1	5.685.000,00	1	5.685.000,00	1	5.685.000,00	
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan												
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa												
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				-		-		-		-		-	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			-		-		-		-		-	
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan				-		-		-		-		-	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan													
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			-		-		-		-		-	
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				32.600.000,00		5.685.000,00		5.685.000,00		5.685.000,00		5.685.000,00	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	1	32.600.000,00	1	5.685.000,00	1	5.685.000,00	1	5.685.000,00	1	5.685.000,00	
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				20.980.000,00		8.910.000,00		8.910.000,00		8.910.000,00		8.910.000,00	
Terlaksananya Lembaga Kemasyarakatan Yang Terfasilitasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	1	20.980.000,00	1	8.910.000,00	1	8.910.000,00	1	8.910.000,00	1	8.910.000,00	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan												
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya												
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan												
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	1		1		1		1		1		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				-		-		-		-		-	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			-		-		-		-		-	
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				-		-		-		-		-	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya			-		-		-		-		-	
7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan				-		-		-		-		-	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan			-		-		-		-		-	
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				17.020.000,00		4.950.000,00		4.950.000,00		4.950.000,00		4.950.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	1	17.020.000,00	1	4.950.000,00	1	4.950.000,00	1	4.950.000,00	1	4.950.000,00	
7.01.03.2.03.0005 - Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				3.960.000,00		3.960.000,00		3.960.000,00		3.960.000,00		3.960.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	1	3.960.000,00	1	3.960.000,00	1	3.960.000,00	1	3.960.000,00	1	3.960.000,00	
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				56.360.000,00		30.300.000,00		30.300.000,00		30.300.000,00		30.300.000,00	
Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			56.360.000,00		30.300.000,00		30.300.000,00		30.300.000,00		30.300.000,00	
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	50	60		50		50		50		50		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat												
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah												
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50	110		50		50		50		50		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50	90		50		50		50		50		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas												
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50	100		50		50		50		50		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri												
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	50	60		50		50		50		50		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	50	60		50		50		50		50		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50											
7.01.03.2.06.0001 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				6.960.000,00		5.050.000,00		5.050.000,00		5.050.000,00		5.050.000,00	
Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	50	60	6.960.000,00	50	5.050.000,00	50	5.050.000,00	50	5.050.000,00	50	5.050.000,00	
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-				-		-		-		-		-	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat													
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			-		-		-		-		-	
7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				12.480.000,00		5.050.000,00		5.050.000,00		5.050.000,00		5.050.000,00	
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50	90	12.480.000,00	50	5.050.000,00	50	5.050.000,00	50	5.050.000,00	50	5.050.000,00	
7.01.03.2.06.0004 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri			-		-		-		-		-	
7.01.03.2.06.0005 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			-		-		-		-		-	
7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				8.680.000,00		5.050.000,00		5.050.000,00		5.050.000,00		5.050.000,00	
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50	110	8.680.000,00	50	5.050.000,00	50	5.050.000,00	50	5.050.000,00	50	5.050.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				17.380.000,00		5.050.000,00		5.050.000,00		5.050.000,00		5.050.000,00	
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50	100	17.380.000,00	50	5.050.000,00	50	5.050.000,00	50	5.050.000,00	50	5.050.000,00	
7.01.03.2.06.0008 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				5.430.000,00		5.050.000,00		5.050.000,00		5.050.000,00		5.050.000,00	
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	50	60	5.430.000,00	50	5.050.000,00	50	5.050.000,00	50	5.050.000,00	50	5.050.000,00	
7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			-		-		-		-		-	
7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50		-		-		-		-		-	
7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				5.430.000,00		5.050.000,00		5.050.000,00		5.050.000,00		5.050.000,00	
Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	50	60	5.430.000,00	50	5.050.000,00	50	5.050.000,00	50	5.050.000,00	50	5.050.000,00	
7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				-		-		-		-		-	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			-		-		-		-		-	
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				57.510.000,00		56.320.000,00		56.320.000,00		56.320.000,00		56.320.000,00	S 3.1
Meningkatnya efektivitas koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah guna mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram dan tertib	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100	100	57.510.000,00	100	56.320.000,00	100	56.320.000,00	100	56.320.000,00	100	56.320.000,00	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				46.160.000,00		54.120.000,00		54.120.000,00		54.120.000,00		54.120.000,00	
Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	1	46.160.000,00	1	54.120.000,00	1	54.120.000,00	1	54.120.000,00	1	54.120.000,00	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat												
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				46.160.000,00		54.120.000,00		54.120.000,00		54.120.000,00		54.120.000,00	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	1	46.160.000,00	1	54.120.000,00	1	54.120.000,00	1	54.120.000,00	1	54.120.000,00	
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			-		-		-		-		-	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				11.350.000,00		2.200.000,00		2.200.000,00		2.200.000,00		2.200.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	1	11.350.000,00	1	2.200.000,00	1	2.200.000,00	1	2.200.000,00	1	2.200.000,00	
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				11.350.000,00		2.200.000,00		2.200.000,00		2.200.000,00		2.200.000,00	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	1	11.350.000,00	1	2.200.000,00	1	2.200.000,00	1	2.200.000,00	1	2.200.000,00	
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				94.644.300,00		43.326.000,00		43.326.000,00		43.326.000,00		43.326.000,00	S 3.1
Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	100	94.644.300,00	100	43.326.000,00	100	43.326.000,00	100	43.326.000,00	100	43.326.000,00	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				94.644.300,00		43.326.000,00		43.326.000,00		43.326.000,00		43.326.000,00	
Terlaksanannya Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100	371	94.644.300,00	100	43.326.000,00	100	43.326.000,00	100	43.326.000,00	100	43.326.000,00	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia												
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa												

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional												
	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila												
	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan												
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1	1		1		1		1		1		
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			-		-		-		-		-	
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				60.639.800,00		15.876.000,00		15.876.000,00		15.876.000,00		15.876.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100	371	60.639.800,00	100	15.876.000,00	100	15.876.000,00	100	15.876.000,00	100	15.876.000,00	
7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			-		-		-		-		-	
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			-		-		-		-		-	
7.01.05.2.01.0005 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			-		-		-		-		-	
7.01.05.2.01.0006 - Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila				-		-		-		-		-	
Berkembangnya Lembaga Masyarakat dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila			-		-		-		-		-	
7.01.05.2.01.0007 - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				16.004.500,00		9.450.000,00		9.450.000,00		9.450.000,00		9.450.000,00	
Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1	1	16.004.500,00	1	9.450.000,00	1	9.450.000,00	1	9.450.000,00	1	9.450.000,00	
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	1	18.000.000,00	1	18.000.000,00	1	18.000.000,00	1	18.000.000,00	1	18.000.000,00	
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				65.530.300,00		136.733.000,00		37.439.000,00		37.439.000,00		37.439.000,00	S 3.1
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa	100	100	65.530.300,00	100	136.733.000,00	100	37.439.000,00	100	37.439.000,00	100	37.439.000,00	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				65.530.300,00		136.733.000,00		37.439.000,00		37.439.000,00		37.439.000,00	
Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			65.530.300,00		136.733.000,00		37.439.000,00		37.439.000,00		37.439.000,00	
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga												
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0		4		0		0		0		
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa												
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan												
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa												
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa												
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum												
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif												

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa												
	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan												
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa												
	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan												
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan												
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya												
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			-		-		-		-		-	
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				11.320.000,00		7.795.000,00		8.475.000,00		8.475.000,00		8.475.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	1	11.320.000,00	1	7.795.000,00	1	8.475.000,00	1	8.475.000,00	1	8.475.000,00	
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				23.505.000,00		8.475.000,00		8.475.000,00		8.475.000,00		8.475.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	1	23.505.000,00	1	8.475.000,00	1	8.475.000,00	1	8.475.000,00	1	8.475.000,00	
7.01.06.2.01.0004 - Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan			-		-		-		-		-	
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			-		-		-		-		-	
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				-		99.974.000,00		-		-		-	
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	-	4	99.974.000,00	0	-	0	-	0	-	
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			-		-		-		-		-	
7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				-		-		-		-		-	
Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			-		-		-		-		-	
7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				30.705.300,00		20.489.000,00		20.489.000,00		20.489.000,00		20.489.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1	1	30.705.300,00	1	20.489.000,00	1	20.489.000,00	1	20.489.000,00	1	20.489.000,00	
7.01.06.2.01.0010 - Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				-		-		-		-		-	
Ditetapkannya Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan			-		-		-		-		-	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
7.01.06.2.01.0011 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			-		-		-		-		-	
7.01.06.2.01.0012 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			-		-		-		-		-	
7.01.06.2.01.0013 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif			-		-		-		-		-	
7.01.06.2.01.0014 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga			-		-		-		-		-	
7.01.06.2.01.0015 - Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			-		-		-		-		-	
7.01.06.2.01.0016 - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			-		-		-		-		-	
7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			-		-		-		-		-	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
7.01.06.2.01.0018 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			-		-		-		-		-	

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Rancabali, 2025

S.3.1. = Program yang Mendukung Sasaran KDH: Meningkatnya kualitas birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien

4.2. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program yang telah dirancang ini selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan kegiatan yang lebih terarah. Kecamatan Rancabali yang memiliki peran dalam mewujudkan visi Kabupaten Bandung melalui misi ke 3 yaitu “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel” telah memetakan subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah. Adapun daftar subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah sebagai berikut. Tanpa ada dukungan dari Kegiatan dan Sub Kegiatan program prioritas Pembangunan daerah tidak dapat berjalan dengan baik berikut ini daftar Sub Kegiatan prioritas yang mendukung Program prioritas Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kabupaten Bandung

No	Program Prioritas	Outcome	Subkegiatan	Keterangan
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain Dilimpahkan	
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
3.	Program Penyelenggaraan Urusan	Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,	

No	Program Prioritas	Outcome	Subkegiatan	Keterangan
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
	Pemerintahan Umum	Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Rancabali, 2025

4.3. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU PD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau

kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*). Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Rancabali tahun 2025-2029 dirumuskan secara sistematis melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang relevan dan terukur. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja. Berdasarkan indikator kinerja Kecamatan yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kedalam Rencana Strategis Kecamatan Rancabali, diidentifikasi indikator kinerja yang bernilai strategis dan memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan performa kinerja Kecamatan.

Indikator Kinerja tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rancabali yaitu Laju IKM.

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rancabali

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	0.19	0.22	0.24	0.25	0.26	0.27	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Rancabali , 2025

4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK

Dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, pengyukuran kinerja menjadi salah satu aspek yang sangat krusial. Namun pada Tingkat Kecamatan, masih terdapat tantangan signifikan, salah satunya adalah belum tersedianya Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terstruktur dan terstandarisasi. Ketiadaan IKK ini menyebabkan sulitnya melakukan evaluasi kinerja secara obyektif, serta membatasi kemampuan untuk menilai sejauh mana

program dan kegiatan Kecamatan berdampak langsung terhadap Masyarakat. Berikut ini tabel yang menjelaskan tentang Indikator kinerja.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Rancabali

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	0.19	0.22	0.24	0.25	0.26	0.27	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Rancabali, 2025

Laju IKM menjadi IKK bagi Kecamatan Rancabali sebagai poin dalam menilai keberhasilan kinerja di 5 tahun renstra.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Kecamatan Rancabali disusun sebagai dokumen awal perencanaan strategis yang menjadi dasar dalam perumusan arah kebijakan pembangunan kecamatan selama periode lima tahun ke depan. Dokumen ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta memperhatikan potensi, permasalahan, dan kebutuhan masyarakat di wilayah kecamatan. Renstra Kecamatan Rancabali memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikator kinerja utama yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya, termasuk Rencana Kerja (Renja) Kecamatan setiap tahunnya. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kecamatan dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Penyusunan Renstra Kecamatan juga mengedepankan prinsip transparansi, partisipatif, akuntabel, dan berbasis data, sehingga diharapkan seluruh program dan kegiatan yang dirancang mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh. Dengan adanya dokumen ini, Kecamatan diharapkan dapat menjadi simpul koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan kewilayahan dan menjembatani kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah daerah. Selanjutnya, Renstra ini akan menjadi bahan pembahasan dalam forum Diskusi maupun konsultasi guna memperoleh masukan untuk menyempurnakan dokumen sebelum ditetapkan sebagai Renstra Kecamatan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Kecamatan Rancabali Tahun 2025-2029 merupakan Pedoman dan acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Rancabali dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, sehingga dengan adanya Renstra ini diharapkan dalam pelaksanaanya, tujuan organisasi dapat tercapai secara sinergi dan berkesinambungan, terutama dalam mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Sehingga untuk mencapai

tujuan tersebut di atas, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Dalam Renstra Kecamatan Rancabali 2025-2029 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan Sub Kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.
2. Renstra Kecamatan Rancabali Tahun 2025-2029 harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Kecamatan Rancabali (Renja Kecamatan Rancabali) untuk setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung.
3. Dalam mendukung penyiapan APBD Kabupaten Bandung, keberadaan Rentra Kecamatan Rancabali harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Rancabali (RKA-DPA Kecamatan Rancabali).
4. Apabila ada kebijaksanaan Panganggaran untuk Kecamatan Rancabali di luar dari Renstra ini maka akan dilakukan perubahan/perbaikan.
5. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Tahun 2025-2029 yang tercermin dari Renja-PD Kecamatan Rancabali, harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

5.3 Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian penting dalam siklus manajemen pembangunan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Di tingkat kecamatan, pelaksanaan pengendalian pembangunan dilakukan melalui mekanisme pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan berdasarkan indikator kinerja dan capaian output. Camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan bertanggung jawab untuk memastikan setiap program dan kegiatan perangkat daerah yang dilaksanakan di wilayahnya berjalan sesuai dengan target dan rencana kerja yang telah disepakati. Evaluasi pembangunan dilakukan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pembangunan sesuai dengan tujuan

dan sasaran yang tertuang dalam dokumen perencanaan, serta untuk mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya, evaluasi ini mencakup evaluasi internal oleh kecamatan dan masukan dari pemangku kepentingan, serta menjadi bahan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan (LKIP). Melalui pengendalian dan evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan, kecamatan dapat mengambil langkah korektif dan perbaikan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang tidak berjalan sesuai rencana, serta meningkatkan kualitas perencanaan di tahun-tahun berikutnya, hal ini penting untuk menjamin akuntabilitas kinerja dan efektivitas pembangunan wilayah yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan Aparatur Kecamatan Rancabali dalam rangka melaksakan tugas, fungsi dan kewenangannya untuk menjalankan kebijakan, Program, dan kegiatan dituntut memiliki karakter dan sifat Tangguh Adaftif, Inovatif, dan Kreatif. Menjadi sebuah komitmen bahwa dokumen ini harus menjadi pijakan yang kuat dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Soreang, September 2025

CAMAT RANCABALI

ttd

KANKAN TAUFIK BARNAWAN

BUPATI BANDUNG

M. DADANG SUPRIATNA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2. Daftar Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Rancabali Berdasarkan Jabatan, Pangkat Golongan 26

Tabel 2.3Daftar Tenaga Non ASN Kecamatan Rancabali..... 27

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Rancabali Berdasarkan Jenis Kelamin 28

2.5 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Rancabali yang telah mengikuti pendidikan struktural dan jabatan esselon berdasarkan jenis kelamin 28

Tabel 2.4 Data Hasil Rekonsiliasi Aset Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2024 30

Tabel 2.7 Data Klasifikasi Aset Berdasarkan Kondisi..... 30

Tanah Tabel 2.10 Data Aset Tanah..... 31

Tabel 2.8 Rincian Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat..... 34

Gambar 2.5 Nilai IKM Kecamatan Rancabali..... 38

Tabel 2.1.3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Rancabali Tahun 2021-2024..... 38

Tabel 2.1.3.3 Kinerja Pencapaian Pelayanan Kecamatan Rancabali ... 40

Tabel 2.14 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Rancabali 49

Tabel 2.2 Permasalahan dan isu strategis Kecamatan Rancabali 58

Tabel 2.9 Tantangan Pembangunan Sumber Daya Manusia..... 61

Tabel 2.10 Tantangan Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Pangan... 61

Tabel 2.11 Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintah..... 61

Tabel 2.12 Tantangan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan..... 62

Tabel 2.13 Tantangan Pembangunan Ketentraman dan Ketertiban Umum..... 62

tabel 2.2.5 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah..... 66

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis..... 69

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran..... 76

Tabel 3.2. Penahapan Renstra Kecamatan Rancabali..... 77

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan ... 79

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan..... 83

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan... 106

Tabel 4.3 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah..... 131

Tabel 4.5Indikator Kinerja Utama (IKU)..... 134

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) 135

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan//Sub Kegiatan Renstra PD..... 81
2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Rancabali..... 17
Gambar 2.2 Peta Jabatan Kecamatan Rancabali Tahun 2025..... 29
Gambar 2.3 Dokumentasi Kegiatan “KARASA” 36
2.4 Profil Instagram dan Facebook Kecamatan Rancabali..... 37
2.5 Gambar Peta Wilayah Kecamatan Rancabai 64